

No. 206 April 2023

www.baktinews.bakti.or.id

BaktiNews

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

**KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI
UNTUK PERUBAHAN
PERILAKU SOSIAL**

**MEMBERANTAS KEMISKINAN
EKSTREM: KONVERGENSI
PROGRAM BERBASIS SASARAN**

**KARENA HARAPAN ITU
AKAN SELALU ADA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI News

April 2023

No. 206

- 1** Komunikasi Antar Pribadi untuk Perubahan Perilaku Sosial
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 5** Lindungi Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual di Ranah Daring
Oleh **ANDI NURLELA**
- 9** Karena Harapan Itu Akan Selalu Ada
Oleh **SAKTIANA DEWI**
- 13** Memberantas Kemiskinan Ekstrem: Konvergensi Program Berbasis Sasaran (Bagian 2)
Oleh **AGUSSALIM**
- 17** Melibatkan Disabilitas
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 21** Ingin Perbaiki Kualitas Pengajaran? Kuncinya Amati Interaksi Guru dan Murid Langsung di Ruang Kelas
Oleh **SYAIKHU USMAN & ASRI YUSRINA**
- 25** Populasinya Semakin Susut, Ancaman Kelestarian Hiu-Pari di Perairan Aru
Oleh **M. JAYA BARENDIS**
- 29** Kak Lily, Warisan Ruang Aman, dan Perjuangan Melawan Dominasi: Sebuah Obituari
Oleh **AULIA ADAM**
- 33** 'Aging Society' dan Kesejahteraan Lansia
Oleh **JASMINE FLORETTA V.D**
- 37** Bacarita Kespro
Oleh **ITA IBNU**
- 40** Diskusi IG Live Story @infobakti dan Podcast Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Ilustrasi cover: Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI

KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI UNTUK PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Kepala Puskesmas: “Bu Ani, ini saya lihat kita sekeluarga belum ada yang ikut vaksin COVID-19, kenapa bu?”

Bu Ani: “Ini Bu Kapus, Bapaknya bilang tidak usah vaksin.”

Kepala Puskesmas: “Kenapa bisa Bu Ani?”

Pak Arman: “Karena banyak yang bilang di internet kalau vaksin itu bahaya, bisa ki meninggal nanti.”

Kepala Puskesmas: “Bu Ani dan Pak Arman, itu vaksin gunanya supaya kita kebal sama penyakit. Memang ada sebagian orang yang demam dan pegal-pegal setelah divaksin, tapi itu cuma sementara ji. Itu artinya daya tahan tubuh ta sedang bekerja supaya bisa lebih kuat melawan virus. Karena vaksin itu sebenarnya virus yang sudah dilemahkan. Setelah itu, Insyaallah kita akan lebih kebal terhadap virus.”

Pak Arman: “Jadi itu yang biasa dilihat di internet bagaimana Bu Kapus?”

Kepala Puskesmas: “Harus ki cek kembali Pak Arman, apakah berita itu benar atau tidak. Jangan sampai berita bohong, karena sekarang itu banyak sekali informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada itu caranya Pak Arman untuk cek berita itu benar atau bohong.”

Pak Arman: “Oh begitu, kalau begitu kita ajar ka caranya. Nanti saya cari tau dulu.”

Kepala Puskesmas: “Iya, silakan Pak Arman. Kami tunggu di puskesmas ya Pak Arman dan keluarga untuk mendapatkan vaksinnnya. Minggu depan ada jadwal vaksin lagi di puskesmas.”

Pak Arman: “Iye Bu Kapus, Insya Allah saya datang mi minggu depan.”



Apa yang Anda lakukan ketika hendak menyampaikan sebuah pesan atau informasi? Ya, komunikasi adalah jawabannya. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun nonverbal dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya.

Pada dasarnya, berikut adalah sejumlah unsur yang terlibat dan memengaruhi proses komunikasi menurut Wiryanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi.

KAPASITAS KOMUNIKATOR PENANGGULANGAN HOAKS DAN INFORMASI KESEHATAN DENGAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI

WAJO, 8-9 MARET 2022



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Komunikator adalah orang atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Dalam hal ini komunikator bertindak sebagai penyampai pesan. Namun, dalam komunikasi antar pribadi, komunikator tidak hanya bertindak sebagai penyampai pesan melainkan juga menginterpretasi respons dari komunikan dan memberikan umpan balik atas respons tersebut. Karena itu, komunikator juga dituntut menjadi pendengar yang baik di samping menjadi penyampai pesan yang baik.

Pesan merupakan seperangkat tanda baik secara verbal maupun nonverbal yang mewakili keadaan khusus komunikator untuk disampaikan kepada komunikan.

Komunikan adalah orang atau pihak yang menerima dan menginterpretasi pesan. Dalam

komunikasi antar pribadi, komunikan bersifat aktif. Selain menerima pesan, komunikan juga menginterpretasi dan memberikan umpan balik kepada komunikator.

Respons adalah sebuah tanggapan yang dilakukan oleh komunikan setelah menerima pesan dari komunikator.

Terdapat pula konteks komunikasi yang terbagi menjadi tiga dimensi yaitu ruang, waktu dan nilai. Konteks ruang merujuk kepada lingkungan tempat terjadinya komunikasi. Konteks waktu merujuk kepada kapan terjadinya komunikasi. Sementara konteks nilai merujuk kepada nilai sosial dan nilai budaya yang memengaruhi suasana komunikasi.

Salah satu tujuan komunikasi adalah adanya perubahan pendapat. Perubahan pendapat ini



bisa terjadi saat proses komunikasi berlangsung atau mampu pula setelahnya. Hal tersebut tergantung bagaimana penyampaian yang dilakukan sang komunikator. Selain itu, Tujuan komunikasi yang lainnya adalah untuk mengubah perilaku. Dalam hal ini, perubahan perilaku dapat terjadi apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dikemukakan oleh komunikator dengan komunikan. Penyampaian ini juga tergantung pada kepercayaan yang diperoleh oleh komunikator dari para komunikan. Karena itu, metode komunikasi antar pribadi adalah kecakapan yang diperlukan oleh para komunikator yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat.

Komunikasi antar pribadi sesungguhnya baru akan tercipta kalau terdapat kesadaran dari dua pihak untuk mengamati keadaan masing-masing pihak dan memberikan respons atas keadaan tersebut. Sebagaimana sifat komunikasi, maka hubungan yang terjadi ditandai dengan adanya sikap saling memperhatikan, saling memahami dan penuh pengertian dan keakraban. Pemahaman yang dimaksud tidak hanya terjadi pada materi komunikasi, tetapi juga pada pemahaman terhadap keunikan pribadi masing-masing.

Kesadaran akan perbedaan-perbedaan inilah yang memungkinkan komunikasi itu menjadi tumbuh dan berkembang. Komunikasi seperti ini akan berbeda dengan suasana komunikasi yang dilakukan dalam situasi lain, contohnya komunikasi antara pembeli dengan penjual di pasar atau antara petugas pencatatan sipil dan warga saat hendak melakukan perekaman KTP. Contoh komunikasi ini tidak mungkin akan tumbuh dan berkembang

sebagaimana komunikasi antar pribadi karena jalinan hubungan untuk menjadi akrab tidak menjadi tekanan utama. Hal yang menjadi perhatian pada contoh komunikasi ini hanyalah pada pemahaman materi komunikasi.

Komunikasi Antar Pribadi untuk Perubahan Perilaku Sosial

Dalam perubahan perilaku komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau mempengaruhi perilakunya. Terdapat tiga prinsip utama mengenai komunikasi antar pribadi untuk perubahan perilaku sosial.

Pertama adalah, membangun keakraban. Hubungan yang akrab adalah faktor penting untuk mengajak orang. Acap kali bukan argumen sah yang membuat orang mau diajak tapi karena kita disukai atau akrab dengan orang itu. Dalam hubungan yang akrab, komunikasi menjadi lebih menyenangkan dan mudah untuk memperoleh kepercayaan dari komunikan. Dengan begitu, semakin mudah pula kita memengaruhi komunikan atas tujuan komunikasi yang kita lakukan.

Prinsip kedua adalah berbicara dan mendengarkan. Agar dapat 'memasukkan' pesan yang pas kepada orang lain, kita perlu mendengarkan orang. Jangan sampai karena kita yang hendak menyampaikan pesan atau mengajak seseorang pada perubahan tertentu, lantas malah kita yang terlalu banyak berbicara. Justru karena ingin mengajak orang lain pada perubahan atau pemahaman tertentu, kita perlu membantu orang agar berbicara lebih banyak dan



Foto-foto: Dok. Yayasan BaKTI

lebih dulu. Tujuannya agar kita dapat memahami apa yang dipikirkan atau dikhawatirkan orang tersebut, sehingga kita bisa menyampaikan pesan yang sesuai.

Kunci Komitmen

Mungkin sekarang komunikator mengatakan mau. Namun, mereka masih bisa berubah sikap bila setelahnya mendapat pesan berbeda yang memengaruhi. Entah karena hoaks, omongan orang lain, ataupun perubahan pikiran sendiri. Karena itu, saat orang sudah setuju atau mau, maka sikap positif orang itu perlu “dikunci” agar dalam perjalanannya tidak mudah berubah. Bila orang sudah mau, kunci komitmennya dengan pertanyaan ulang atau penegasan. Bila belum mau, jangan mendesak. Teruslah berkomunikasi dengan sabar.

Menanggulangi Hoaks dan Misinformasi Kesehatan

Sebagai upaya menciptakan perubahan sosial masyarakat dalam menghadapi hoaks dan misinformasi kesehatan, maka program Social Behaviour Change (SBC) yang didukung oleh UNICEF melalui Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas Komunikator untuk Penanggulangan Hoaks dan Misinformasi Kesehatan dengan Teknik Komunikasi Antar Pribadi. Kegiatan ini dilaksanakan di empat wilayah program yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Bone dan Wajo pada 7-16 Maret 2023. Penguatan kapasitas ini melibatkan lima ratus orang peserta, yang kemudian disebut sebagai komunikator. Kelima ratus orang komunikator ini terdiri dari berbagai

unsur di antaranya, tenaga kesehatan, perwakilan kelompok-kelompok masyarakat dan siswa-siswi SMA/Sederajat.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Komunikator untuk Penanggulangan Hoaks dan Misinformasi Kesehatan dengan Teknik Komunikasi Antar Pribadi ini difasilitasi oleh lima orang *trainer* yang telah dilatih sebelumnya dalam *Training of Trainer* Penanggulangan Hoaks dan Misinformasi Kesehatan. Dalam kegiatan ini, para komunikator memperoleh pengetahuan dan mempraktikkan teknik Komunikasi Antar Pribadi (KAP) yang berguna untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Selain itu, para peserta juga memperoleh penguatan literasi digital meliputi pengenalan internet dan media sosial, perlindungan data pribadi dan identifikasi informasi benar dan hoaks.

Semua pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini selanjutnya akan menjadi bekal bagi para komunikator untuk mengedukasi masyarakat di sekitar mereka tentang cara menanggulangi hoaks dan misinformasi kesehatan. Hingga satu bulan ke depan, proses edukasi dari komunikator kepada masyarakat sekitarnya akan berlangsung. Diharapkan dengan upaya ini, informasi mengenai penanggulangan hoaks dan misinformasi kesehatan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Dengan begitu, kemampuan literasi digital masyarakat pun dapat meningkat, dan ikut meningkatkan pula cakupan kesehatan masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program Kerja Sama Yayasan BaKTI-Unicef dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto: M. Syafrizal/Yayasan BaKTI

LINDUNGI ANAK DARI EKSPLOITASI & KEKERASAN SEKSUAL DI RANAH DARING

Oleh **ANDI NURLELA**

Selama pandemi COVID-19, anak diharuskan belajar dari rumah dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Hal ini merupakan kemudahan yang secara global dilaksanakan termasuk di Indonesia agar pendidikan anak tetap berjalan dengan baik. Internet sangat berperan penting dalam mendukung pendidikan anak, memberi mereka informasi tentang cara tetap aman, dan

memastikan mereka tetap menjalin relasi sosial. Dengan internet dapat pula menjadi alat ampuh bagi anak untuk terhubung, bereksplorasi, belajar, dan terlibat dalam langkah-langkah kreatif dan positif.

Di sisi lain, dengan intensitas anak dalam penggunaan teknologi dan internet sejak pandemi hingga saat ini semakin membuat mereka rentan menjadi korban kejahatan di Internet dan target predator seksual. Survei yang dilakukan ECPAT Indonesia pada tahun 2020 terhadap 1203 responden anak usia 6 hingga 17 tahun menemukan bahwa terdapat 287 bentuk pengalaman buruk saat berinternet di masa pandemi, salah satunya menerima gambar/video yang menampilkan pornografi. Selain itu ada juga potensi bahaya yang harus diwaspadai saat anak-anak daring. Salah satu risiko tersebut adalah eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring (*OCSEA/ Online Child Sexual Exploitation And Abuse*).

Indonesia termasuk dalam 10 negara teratas dengan kasus kekerasan seksual anak *online*

tertinggi (sejak 2005). Hal ini didukung oleh survei bahwa 3 dari 10 anak mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual online (ECPAT, DtZ 2020). Padahal Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi sudah tertuang ke dalam Pasal 34 KHA dan juga hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan terdapat di Pasal 36 KHA sebagai bentuk perlindungan anak di ranah daring.

Apa itu Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak di Ranah Daring?

Eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring (*Online Child Sexual, Exploitation and Abuse* atau OCSEA) mengacu pada situasi yang melibatkan teknologi digital, internet dan komunikasi di beberapa titik selama kontinum pelecehan atau eksploitasi. OCSEA dapat terjadi sepenuhnya melalui daring atau melalui campuran interaksi daring dan tatap muka antara pelaku dan anak-anak. Dari hasil penelitian ECPAT, INTERPOL dan UNICEF, menemukan anak-anak di Indonesia menjadi sasaran eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring, tetapi tidak melaporkannya. Memilih tidak memberi tahu siapapun tentang apa yang terjadi pada mereka menghubungkannya dengan kekhawatiran tidak dianggap serius, ketakutan tidak ada yang akan percaya atau memahami situasi mereka atau tidak menganggap kejadian itu cukup serius untuk dilaporkan. Misalnya, seorang anak yang ditawarkan uang atau hadiah untuk gambar seksual dan dua anak yang gambar seksualnya dibagikan tanpa izin tidak melapor karena takut tidak ada yang mengerti situasinya.

Kenali Bentuk-Bentuk OCSEA

Bentuk-bentuk inilah merupakan penyalahgunaan internet dan teknologi digital untuk tujuan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak. Mulai dari berbagai materi yang menampilkan kekerasan/eksploitasi anak, *grooming online*, *sexting*, pemerasan seksual/*sexorting*, *streaming* langsung, dan

cyber-bullying merupakan kejahatan terhadap anak yang membutuhkan respons global mendesak, multi sektoral, dan menyeluruh. Bentuk kejahatan ini biasanya tersimpan dalam arsip permanen dalam bentuk gambar atau video digital, dan terus disebarluaskan secara daring, sehingga mengorbankan anak berulang kali. Karena risiko bahaya yang terus berkembang dan bertambah secara eksponensial, upaya pencegahan dan perlindungan menjadi lebih sulit buat pemerintah, penyedia layanan perlindungan anak, orang tua/pengasuh dan anak itu sendiri ketika tidak terjalin sinergi antara satu sama lain.

Bagaimana Mencegah OCSEA?

Kemajuan menuju konektivitas internet secara luas di seluruh dunia, semakin mendesak untuk menginvestasikan keselamatan dan perlindungan anak secara daring. Sejumlah pemerintah di seluruh dunia semakin mengakui kehadiran ancaman eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring, dan beberapa di antaranya telah mengambil langkah-langkah memperkenalkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan menempatkan sejumlah tindak pencegahan. Akan tetapi menurut KEMENKO PMK (republika.co.id), setidaknya ada 4 langkah utama yang dapat dilakukan orang tua atau pengasuh sebagai lingkungan terdekat anak untuk melindungi dari eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring, yaitu orangtua perlu melibatkan diri dan dekat dengan aktivitas daring sang anak, termasuk dalam memahami *game online* atau hal apa saja yang ia lakukan. Kedua, orang tua perlu mengedukasi diri dan anak mereka terhadap pencegahan dari eksploitasi dan kekerasan seksual yang dapat terjadi melalui *game online*. Ketiga, pastikan seluruh perangkat gawai dan komputer saling terhubung dan terlindungi agar dapat memantau aktivitas anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual sebagai tindakan pencegahan. Terakhir, laporkan segala bentuk tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual jika orang tua/pengasuh mengetahui kejadian kejahatan seksual anak sebagai tindakan lebih lanjut, dapat menghubungi PATBM/Shelter



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Warga yang ada di tingkat desa/kelurahan, DP3A/UPT PPA kab/kota, unit teknis terkait, melalui SAPA 129; TePSA 1500771, Komnas Perempuan: pengaduan@komnasperempuan.go.id, dan KPAL.

Implementasi Program OCSEA sebagai bentuk Pencegahan

Membangun ruang yang aman dan ramah anak di era digital seperti sekarang ini tidak hanya menjadi tugas para orang tua/pengasuh, akan tetapi menjadi tugas bersama yang harus saling bergandeng tangan untuk melakukan perlindungan anak di ranah daring. Untuk itu UNICEF melalui Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengimplementasikan program OCSEA untuk tahun 2023 – 2024 di 20 desa yang ada di 4 kabupaten/kota (Makassar, Maros, Bone dan Wajo) sebagai wujud dalam mencegah dan sekaligus merespons ketika terjadi kasus kejahatan seksual eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring.

Program ini diawali dengan koordinasi serta sosialisasi mengenai Pentingnya Perlindungan Anak di Ranah Daring ke 20 desa/kelurahan yang merupakan wilayah intervensi OCSEA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya: Makassar 6 kelurahan: Manggala (Kec. Manggala), Tamamaung (Kec. Panakukang),

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DESA JENETAESA KECAMATAN SIMBANG INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Datang	Pindah	Lahir	Meninggal	Total Penduduk Saat Ini
		Lk	Pr					
1	BANTIMURUNG	838	947					1.785
2	BATUBASSI	1.045	1.021	2.066				2.066
		1.41	1.43	284				284
								261

Pattingalloang (Kec. Ujung Tanah), Batua (Kec. Manggala), Maccini Sombala (Kec. Tamalate), dan Bangkala (Kec. Manggala). **Maros** 4 Desa: Bontomarannu (Kec. Lau), Pajukukang (Kec. Bontoa), Je'netaesa (Kec. Simbang), dan Temmapadaue (Kec. Marusu). **Bone** 6 Desa: Mallari (Kec. Awangpone), Cumpiga (Kec. Awangpone), Ajjalireng (Kec. Tellu Siattingnge), Welado (Kec. Ajangale), Malimongeng (Kec. Salomekko), dan Abbumpungeng (Kec. Cina). **Wajo** 4 Desa: Tempe (Kec. Tempe), Limporilau (Kec. Belawa), Mattirowalie (Kec. Maniangpajo), dan Lompoloang (Kec. Pitumpanua)

Melalui program pencegahan OCSEA di desa/kelurahan diharapkan memperkuat kapasitas dan pemahaman anak sebagai kelompok sasaran, teman sebaya sebagai pelopor dan pelapor, orang tua/pengasuh dan masyarakat yang tergabung di sebuah komunitas/organisasi, pemberi layanan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan (PATBM/PUSKESOS/Shelter Warga) sebagai pihak yang akan melakukan pencegahan dan respons, serta pemerintah desa/kelurahan sebagai leading utama yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan intervensi yang dilakukan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dilakukan dengan cakap dan dapat memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kejahatan seksual di ranah daring.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program Kerja sama Yayasan BaKTI-UNICEF dapat menghubungi info@bakti.or.id

KARENA HARAPAN ITU AKAN SELALU ADA

Oleh **SAKTIANA DEWI**

Di Kabupaten Sumba Barat Daya, pendidikan masih menjadi pekerjaan panjang yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Salah satu permasalahan pendidikan terbesar yang dihadapi oleh para tenaga pendidik di Sumba Barat Daya adalah kemampuan literasi dan numerasi para siswa. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang diadakan oleh Pusmenjar pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 76,15% siswa di Nusa Tenggara Timur memiliki kompetensi membaca terkategori kurang. Persentase ini lebih tinggi dari rerata nasional yaitu 55,85%.

Arnoldus Zangadu, salah satu guru SD di Sumba Barat Daya yang masih berjuang untuk memperbaiki tingkat literasi dan numerasi para siswa. Beliau sempat merasa skeptis karena setiap hari harus berhadapan dengan berbagai tantangan dalam mengajarkan murid-muridnya membaca, menulis, dan berhitung. Iklim sekolah yang kurang mendukung dan minimnya keterlibatan orang tua, membuat beliau terkadang merasa frustrasi dalam mengajar.

Dulu, beliau merasa bahwa mengajar para murid perlu menggunakan cara yang keras agar mereka bisa memahami pelajaran. Apalagi beliau merupakan guru kelas VI. Masih banyak anak di kelasnya yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung dengan baik.

“Saya pernah berkata kepada murid-murid saya, ‘Percuma saja kalian di kelas VI, membaca saja tidak bagus.’ Saya pun simpulkan, semua anak-anak di sini sama saja. Jadi, mau diajar bagaimanapun akan tetap sama. Saya frustrasi waktu itu dan tidak tahu harus gunakan cara seperti apa lagi dalam mengajar. Segala cara sudah dicoba, tapi tidak bisa buat mereka paham. Konsentrasi mereka terbatas, tidak bisa fokus mendengarkan saya ketika mengajar. Saya kadang gunakan kekerasan agar mereka takut dan mau dengar instruksi saya,” kata Pak Arnold.

Persepsi terhadap kemampuan siswa dan kegundahan dalam mengemban tugas sebagai guru SD ternyata tidak hanya dirasakan oleh Pak Arnold tetapi juga dialami oleh para guru lainnya. Banyak guru yang menghadapi tantangan yang sama dan belum menemukan jalan keluar agar para siswa dapat menyusul ketertinggalan di bidang literasi dan numerasi.

Berangkat dari permasalahan inilah, William & Lily Foundation bersama Kuark Internasional berinisiatif untuk meningkatkan kemampuan para guru melalui pelatihan dan pendampingan intensif “Penguatan Konsep Kurikulum Pendidikan Khusus Literasi Dasar dengan Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Sekolah Dasar.”

Di awal program, Pak Arnold memperhatikan sikap skeptis tentang pentingnya mengubah cara mengajar yang telah belasan tahun dilakoninya, termasuk persepsinya terhadap para murid. Ketika model pengembangan pelatihan dan pendampingan dengan model inkuiri yang mendorong guru menemukan dan menciptakan secara mandiri diperkenalkan, Pak Arnold merasa tertantang untuk mencoba.

Paparan hasil temuan awal William & Lily Foundation bersama Tim Kelas Lentera Kuark Internasional kepada Pak Arnold dan para guru tentang kondisi kognitif siswa dan kesiapan belajar juga melunakkan hati guru untuk lebih berempati terhadap siswa. Pak Arnold pun semakin mengenal kondisi siswanya bahwa banyak batu pijakan yang harus dibangun untuk membantu anak-anaknya menjadi mandiri dalam belajar. Hal ini membuat Pak Arnold semakin bersemangat untuk belajar dan memperbaiki diri.



“Saya kaget waktu dikasih tahu temuan awal anak-anak murid saya seperti apa. Ternyata mereka dites psikologi tertinggal 3 tahun di usianya. Pantas saja susah sekali rasanya mengajar mereka. Ternyata kami sebagai guru harus bangun pondasi dasarnya dulu. Batu-batu untuk mereka bisa baca, tulis hitung dan jadi mandiri. Jadi kami harus ubah cara kami mengajar,” ungkap Pak Arnold.

Pak Arnold pun kemudian tertantang untuk mengimplementasikan metode-metode yang diberikan selama program pelatihan. Berbagai metode ia coba, seperti SMART (Senam, Motorik, Aktif, Riang, dan Semangat) untuk menguatkan kesiapan motorik anak dalam belajar, metode literasi dengan pra-saat dan pasca-baca, metode Konkrit-Gambar-Abstrak (KGA) dalam mengajarkan numerasi secara kontekstual, dan metode inkuiri sebagai budaya belajar yang menumbuhkan keingintahuan siswa. Jiwa pembelajar semakin tumbuh pada diri beliau.

“Pembelajaran literasi, selama ini kita lebih banyak berpikir literasi baca saja. Kalau sekarang banyak variasinya, tidak hanya aspek membaca, bisa menulis, menyimak, mendengarkan, bahkan drama. Untuk numerasi, selama ini sifatnya abstrak, angka-angka. Sekarang prosesnya bisa gunakan metode KGA (Konkrit, Gambar, Abstrak). Bagus sekali anak-anak perubahannya. Lebih berani dan aktif juga,” kata Pak Arnold.

Setelah melakukan cara-cara baru secara konsisten, Pak Arnold mulai merasakan perubahan pada siswanya. Perubahan-perubahan ini membuatnya semakin percaya pada kemampuan anak-anaknya. Beliau mulai percaya

bahwa selama guru mampu memberikan pembelajaran dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa, anak-anak pasti bisa.

“Sekarang saya tersadar. Pikiran saya yang sebelumnya mengasumsikan bahwa anak-anak di sekolah saya sama saja, mau diajar bagaimanapun tetap akan sama, ternyata keliru. Selama ini mungkin cara saya saja yang belum tepat atau mungkin perlu kekonsistenan dalam menjalankan. Saya menyadari pentingnya saya sebagai guru untuk terus belajar dan mampu memahami anak dengan lebih baik.”

Growth mindset yang mulai tumbuh karena pelatihan dan pendampingan dengan model inkuiri membentuk Pak Arnold menjadi pribadi pembelajar. Beliau banyak melakukan praktik baik pengembangan metode belajarnya dari mulai praktik literasi menulis tangan rapi, praktik numerasi menggunakan metode KGA dengan benda kontekstual SBD, hingga pembelajaran inkuiri untuk mengasah keingintahuan dan kreativitas siswa. Beliau hadirkan pembelajaran yang eksploratif, dan siswa menjadi pusatnya.

“Sekarang guru sebagai pemandu. Anak-anak sangat menikmati belajar. Mereka tidak dalam posisi tertekan dan hanya mendengar saja. Kita buat proses pembelajaran untuk anak ini menjadi proses yang sifatnya bermain”, ungkap Pak Arnold.

Saat pandemi Covid-19 menghantam dunia pendidikan, Pak Arnold pun tidak menyerah dengan keadaan yang serba terbatas. Bekal yang didapat selama pelatihan dan pendampingan, membuat Pak Arnold mampu berpikir adaptif dalam melakukan pembelajaran jarak jauh saat masa BDR (Belajar dari Rumah).



Foto-foto: Dok. William & Lily Foundation

“Kami buat LKS yang baik. Banyak proyek yang dekat dengan anak. Setelah dibuat kita pun tidak bisa kirim lewat WA. Jadi kita antar ke rumah anak-anak dan damping belajar,” ungkap Pak Arnold.

Tidak dapat belajar secara *online*, bukan berarti anak-anaknya harus berhenti belajar. Beliau membentuk kelompok murid yang rumahnya berdekatan, dan menyiapkan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang bersifat proyek yang dekat dengan anak.

Tak hanya itu, persepsi terhadap siswa yang berubah dan juga pemahaman pengajaran yang lebih baik juga membawa perubahan secara personal terhadap diri Pak Arnold. Dikenal sebagai guru bertangan besi, saat ini berubah menjadi sosok guru yang diidolakan. Bukan hanya oleh anak-anak, namun juga oleh orang tua.

“Kalau dulu di anak saya, Rasti, ia sangat takut dengan Pak Arnold. Tapi sekarang anak saya Agim, tidak terlalu takut, malah lebih dekat. Dulu anak-anak kalau ada salah main tangan, tetapi sekarang tidak. Hanya ditegur saja, makanya anak-anak senang dengan beliau. Mungkin sekitar dua tiga tahun ini ada perubahan. Proses mengajarnya juga lebih aktif. Anak-anak senang dengan guru”, ungkap Siti Aminah, Orang tua siswa SDN Waikelo.

Tidak berhenti hanya di kelasnya, banyaknya perubahan yang dirasakan Pak Arnold memicu beliau untuk terus bergerak dan mulai berbagi. Pak Arnold kini mulai nyalakan lenteranya di komunitas sekitarnya. Pak Arnold membagikan praktik-praktik baik dalam literasi dan numerasi pada rekan guru di sekolah, antar sekolah, forum KKG (Kelompok Kerja Guru), maupun di forum

antar KKG. Beliau juga sebagai kontributor penulis untuk Buku Perkusi (Pedoman Inkuiri, Literasi dan Numerasi) serta Buku Berbagi Praktik Baik Literasi, Numerasi dan Inkuiri.

Beliau juga semakin aktif menginisiasi berbagai program inovatif pengembangan kompetensi guru pada KKG di gugusnya. Sebagai Ketua KKG Gugus V, beliau juga membuat berbagai program kerja pemberdayaan guru sebagai guru pembelajar, seperti berbagi praktik baik literasi dan numerasi dan pembuatan lembar kerja yang kontekstual.

“Saya berharap, keberhasilan praktik baik saya ini, bisa menginspirasi guru lainnya dalam melakukan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Sehingga, perubahan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh saya sendiri, tetapi juga oleh guru lainnya”, ujar Pak Arnold.

Program Penguatan Konsep Kurikulum Pendidikan Khusus Literasi Dasar dengan Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Sekolah Dasar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru dan mengembangkan kemampuan literasi serta numerasi dasar siswa di tiga sekolah percontohan, yaitu SDN Waikelo, SDN Watu Takula, dan SDN Payola Umbu. Program ini menargetkan para guru agar dapat memahami dan mengimplementasikan penilaian dengan prinsip pendekatan pembelajaran inkuiri berbasis lingkungan melalui pemanfaatan potensi lokal, sesuai karakter, kurikulum, peserta didik, dan lingkungan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi www.wlf.or.id

MEMBERANTAS
KEMISKINAN EKSTREM:

KONVERGENSI PROGRAM BERBASIS SASARAN

(Bagian 2 - Selesai)

Oleh **AGUSSALIM**

Naiknya harga pangan menyebabkan mereka yang hidup di *bottom level* dalam hierarki distribusi pendapatan, benar-benar mengalami kesulitan. Inflasi pangan memiliki dampak yang sangat buruk pada keluarga miskin. Orang miskin di negara-negara berpenghasilan rendah menghabiskan sekitar dua pertiga dari sumber daya mereka untuk makanan, sehingga kenaikan harga pangan akan memicu kemiskinan yang lebih dalam. Jumlah orang yang menderita kekurangan nutrisi dan gizi dipastikan bertambah. Memerangi kemiskinan ekstrem menjadi semakin menantang, bukan hanya karena harus menangani yang termiskin dari yang miskin, tetapi juga target pemerintah untuk mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024 menjadi tampak mustahil.

Meski berada di tengah situasi yang serba sulit, pemerintah tetap harus memegang kendali dan berdiri di barisan terdepan untuk memerangi kemiskinan ekstrem. Ruang fiskal pemerintah yang mulai sedikit longgar seiring dengan semakin terkendalinya COVID-19, memberi



peluang kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial kepada mereka yang berada dalam kondisi miskin ekstrim.

Untuk memudahkan intervensi terhadap orang miskin ekstrem, penting untuk mengidentifikasi secara tepat mereka yang terperangkap ke dalam kemiskinan ekstrem. Dari berbagai hasil studi dan laporan resmi tentang kemiskinan, karakteristik umum mereka yang miskin ekstrem, antara lain, tidak bekerja atau telah kehilangan pekerjaan, tidak terdidik dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian, tidak punya akses terhadap sumber daya ekonomi, tidak mendapatkan layanan publik yang diperlukan, tidak memiliki pekerjaan tetap, bekerja di sektor tradisional, seperti buruh tani, petani penyakap, nelayan, dan buruh kasar, serta bermukim di



Foto: Yayasan BaKTI/Yusuf Ahmad

wilayah perdesaan, pesisir, dan kawasan kumuh perkotaan. Akibatnya, mereka menerima balas jasa ekonomi yang minim, memiliki tempat tinggal yang tidak layak, tidak memiliki aset dan tabungan, dan tidak bisa berinvestasi pada peningkatan sumber daya manusia.

Kalaupun orang miskin ekstrem telah berhasil diidentifikasi, pekerjaan berikutnya tetap tidak mudah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penyebab dan sekaligus kendala paling mendasar bagi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari penduduk miskin yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Kendala sumber daya manusia juga menyulitkan untuk melakukan intervensi

terhadap penduduk miskin. Ketiadaan pendidikan dan keterampilan, menyebabkan berbagai macam instrumen intervensi untuk penduduk miskin tidak bisa bekerja secara optimal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk miskin telah memberi implikasi yang luas terhadap kondisi ketenagakerjaan. Beberapa hasil studi terakhir, seperti penelitian Agussalim (2017), menemukan fakta bahwa lebih dari 50 persen anggota rumah tangga miskin yang berada di usia kerja, tidak bekerja alias menganggur, sehingga memberi beban terhadap keuangan rumah tangga.

Konvergensi Program

Memberantas kemiskinan ekstrem, tentu saja, bukan perkara mudah. Ini masalah yang

kompleks dan rumit, dan karenanya membutuhkan kecermatan, ketepatan dan kesungguhan. Meski sulit, harus ada cara yang bisa dilakukan untuk menarik orang keluar dari jeratan kemiskinan ekstrem. Pemerintah yang serius dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem harus melakukan dua hal, yaitu: pertama, merancang program yang dapat memastikan bahwa orang miskin terangkat dari kemiskinan ekstrem; dan kedua, menyediakan jaring pengaman sosial yang melindungi orang miskin agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih parah. Agar dua hal ini dapat dilakukan secara efektif, menuntut pembuat kebijakan untuk dapat mengakses data dan informasi yang akurat tentang siapa yang miskin, di mana, dan mengapa. Melacak kemiskinan dengan tepat menjadi faktor penting untuk memulai intervensi.

Disadari sepenuhnya oleh para pembuat kebijakan bahwa mengatasi kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan tindakan tunggal, tetapi harus bersifat multi-intervensi yang dilaksanakan secara terintegrasi. Kolaborasi aktor dan sinergitas program/kegiatan merupakan sebuah keniscayaan untuk memerangi kemiskinan ekstrem. Kombinasi berbagai program/kegiatan yang paling mungkin dilakukan dengan menysasar kelompok penduduk miskin ekstrem.

Kendala/Hambatan

Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penyebab dan sekaligus kendala paling mendasar bagi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ketiadaan pendidikan dan keterampilan, menyebabkan berbagai macam instrumen intervensi untuk penduduk miskin tidak bisa bekerja secara optimal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk miskin telah memberi implikasi yang luas terhadap kondisi ketenagakerjaan.

Ketidaktersediaan data faktual dan mutakhir tentang orang miskin ekstrem juga telah menyulitkan upaya intervensi. Data yang berada di tangan para pengambil kebijakan seringkali tidak sepenuhnya sanggup mendeteksi mereka

yang mengalami kemiskinan ekstrem. Beberapa kasus kematian akibat kelaparan dalam beberapa hari terakhir menegaskan fakta tersebut. Kesulitan semakin meningkat karena data orang miskin ekstrem bergerak secara dinamis mengikuti situasi yang berubah dengan cepat. Pencacahan statistik berjalan di belakang pergerakan data orang miskin ekstrem.

Jangkauan perlindungan sosial (*social protection*) perlu diperluas untuk dapat menjangkau warga yang miskin kronis. Perlindungan sosial diperlukan untuk sekedar memastikan bahwa orang yang mengalami kemiskinan ekstrem bisa tetap bertahan. Perlindungan sosial, terutama dalam bentuk pemberian uang tunai dan bantuan pangan, banyak dipraktikkan di berbagai negara untuk meredam kemiskinan ekstrem. Distribusi pangan dan bantuan makanan harus mampu menjangkau seluruh warga negara termiskin. Perlindungan sosial juga harus lebih inklusif, yang menysasar kelompok rentan, seperti orang lanjut usia, orang sakit menahun, penyandang disabilitas, dan penyandang masalahsosal.

Layanan publik dan sosial dasar perlu dihantarkan ke warga miskin. Untuk 'menggunting' rantai kemiskinan, pemerintah harus berinvestasi pada upaya peningkatan sumber daya manusia penduduk miskin. Anak-anak yang berasal dari rumah tangga miskin, harus dipastikan mampu menjangkau layanan pendidikan dan tetap bisa duduk di bangku sekolah sampai pada batas yang paling mungkin. Sedangkan untuk memperbaiki kualitas hidup rumah tangga miskin, pemerintah harus menghantarkan berbagai layanan sosial dasar seperti layanan air bersih, energi listrik, sanitasi, rumah layak huni, dan lain-lain.

Program penanggulangan kemiskinan harus berfokus dan bertumpu pada penguatan kapasitas dan kapabilitas orang miskin. Upaya ini diarahkan pada mereka yang berada di usia produktif tapi tidak bekerja atau tidak memiliki kegiatan usaha. Tindakan harus dimulai dengan pemberian keterampilan melalui berbagai skema pelatihan. Ini penting mengingat fakta lapangan

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang menjadi penghambat utama mereka sulit mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha. Upaya ini perlu disusul dengan pemberian bantuan peralatan dan modal sesuai dengan keterampilan yang telah diberikan. Pemantauan dan pembinaan terhadap aktivitas usaha mereka, juga perlu terus dilakukan. Upaya paralel semacam ini diyakini akan sanggup memperbaiki produktivitas, mengurangi ketergantungan, menekan kerentanan, dan meningkatkan kemandirian penduduk miskin.

Pemerintah yang serius dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem harus melakukan dua hal secara simultan, yaitu: pertama, merancang program yang dapat memastikan bahwa orang miskin terangkat dari kemiskinan ekstrem; dan kedua, menyediakan jaring pengaman sosial yang melindungi orang miskin agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih parah.

Secara garis besar, ada empat program utama untuk memberantas kemiskinan ekstrem yang harus berjalan secara konvergen, yaitu: (i) memberikan perlindungan dan jaminan sosial; (ii) menghantarkan berbagai layanan publik dan sosial dasar; (iii) meningkatkan kapasitas/kapabilitas penduduk miskin; dan (iv) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi.

Program pertama dan kedua lebih diarahkan untuk sekedar mencegah agar orang miskin tidak semakin menderita. Sedangkan program ketiga dan keempat lebih diarahkan untuk memutus lingkaran kemiskinan dan mengangkat taraf hidup orang miskin secara berkelanjutan.

Diperlukan upaya pelatihan mata pencaharian yang makin intensif. Penerima manfaat dilatih untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan dengan aset baru, seperti beternak, berdagang kecil-kecilan, dan berbagai kegiatan lainnya yang menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset baru dimaksud berasal dari transfer sumber daya pihak ketiga kepada orang miskin ekstrim sehingga memungkinkan mereka menghasilkan

pendapatan dan mengakumulasi modal manusia yang diperlukan untuk keluar dari kemiskinan ekstrim.

Akses penduduk miskin terhadap sumber daya perlu ditingkatkan. Upaya ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah bekerja atau sudah merintis kegiatan usaha. Pemerintah perlu terus menggerakkan rumah tangga miskin ke sarana dukungan yang layak dan memfasilitasi mereka untuk memperoleh akses terhadap kredit mikro (*micro-credit*), sarana dan prasarana produksi, pekerjaan yang lebih layak, dan pasar. Bagian utama dari upaya ini adalah menciptakan inklusi keuangan yang memungkinkan orang miskin memiliki akses terhadap produk keuangan formal. Akses yang mudah terhadap sumber keuangan, di banyak tempat terbukti efektif untuk memperbaiki kehidupan penduduk miskin.

Program-program untuk menekan beban pengeluaran penduduk miskin perlu diintensifkan agar produktivitas penduduk miskin dapat ditingkatkan. Program layanan pendidikan dan kesehatan gratis untuk rumah tangga miskin perlu terus dilanjutkan dengan memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas. Program semacam ini, di samping dapat menekan beban pengeluaran penduduk miskin dalam jangka pendek, juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dalam jangka panjang. Menyertai usaha tersebut, program-program yang diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas penduduk miskin juga harus terus diupayakan dan ditingkatkan intensitas dan jangkauannya, misalnya melalui pemberian kredit mikro, program padat karya perdesaan, pelatihan keterampilan, dan sebagainya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Kepala Divisi Formulasi Kebijakan Publik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dan Peneliti Senior pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Universitas Hasanuddin.
Email : agussalim@fe.unhas.ac.id www.agusjero.blogspot.com

MELIBATKAN DISABILITAS

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization, ILO*) dan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), jumlah orang dengan disabilitas atau penyandang disabilitas di dunia mencapai 15% dari penduduk dunia. Merujuk data yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa penduduk dunia pada November 2022 mencapai 8 miliar orang, maka jumlah disabilitas atau difabel di dunia mencapai 1,2 miliar orang.

Jika mengacu pada ILO dan WHO maka jumlah disabilitas di Indonesia mencapai 41 juta orang dari 275 juta penduduk pada tahun 2022. Angka 41 juta orang dengan disabilitas adalah suatu jumlah yang sangat besar.

Namun, disabilitas adalah kelompok minoritas, marginal, dan rentan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan di dalam keluarga tertentu, anggota keluarga yang menyandang disabilitas mengalami berbagai perlakuan yang tidak manusiawi, seperti mengalami diskriminasi dan kekerasan, disembunyikan, tidak dimasukkan dalam anggota keluarga (misalnya dalam kartu keluarga), dan sebagainya.

Disabilitas mengalami diskriminasi berlapis karena selain menyandang disabilitas, mereka juga menyandang identitas lain, seperti sebagai



perempuan, anak, suku minoritas, penganut agama minoritas, dan sebagainya. Seorang perempuan disabilitas dan miskin kemungkinan mendapatkan diskriminasi berlapis sebagai perempuan, sebagai disabilitas, sekaligus kemiskinannya.

Di dalam Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities, CRPD 2006*) disebutkan orang dengan disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1).



Foto-foto: Dok. Program INKUSI - Yayasan BaKTI

Empat kategori keterbatasan yang disebut dalam CRPD itulah yang dikenal sebagai ragam disabilitas, yang diadopsi dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016). Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UUPD) menyebutkan ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (Pasal 4 ayat 2).

Karena keterbatasan atau kesulitan yang dialami disabilitas, maka perlu afirmasi yang dilakukan oleh negara dan berbagai lembaga untuk pemenuhan hak-hak disabilitas, di antaranya adalah partisipasi disabilitas di ruang publik dan pembangunan. Di dalam CRPD terdapat prinsip partisipasi penuh, efektif, dan keikutsertaan dalam masyarakat, serta

kesetaraan kesempatan. Sedangkan di dalam UUPD disebut partisipasi penuh, kesamaan kesempatan, dan kesetaraan.

Partisipasi adalah Hak

Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan. CRPD dan UUPD mengamanatkan agar publik dapat mendorong dan membuka ruang agar disabilitas berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk mendorong dan memfasilitasi pembentukan organisasi disabilitas untuk mewakili kepentingan disabilitas di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Yayasan BaKTI melalui Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) bekerja sama dengan organisasi disabilitas di Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten Maros memfasilitasi pembentukan organisasi disabilitas yang diberi nama Forum Disabilitas Maros (FORDISMA). Pengurus FORDISMA berasal dari berbagai organisasi disabilitas di Kabupaten Maros, di antaranya HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), SHG (Shelf Health Group), NPC (National Paralympic Committee), GERKATIN (Gerakan Tuna Rungu Indonesia), dan PPDI (Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia), serta perwakilan disabilitas dari desa-desa yang merupakan wilayah Program INKLUSI BaKTI dan SCF (Sulawesi Community Foundation) yang merupakan mitra dari Kemitraan dalam Program INKLUSI.

Pembentukan FORDISMA bertujuan untuk: menjadi wadah berhimpunnya disabilitas (ragam disabilitas) di Kabupaten Maros; bertindak sebagai organisasi yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak disabilitas; dan menjadi mitra pemerintah dalam pembentukan kebijakan terkait dengan disabilitas.

Forum ini dibentuk untuk menjadi wadah disabilitas dan organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Maros. Setelah dibentuk dan dikukuhkan pada Desember 2022, forum ini terlibat dalam beberapa kegiatan penting yang difasilitasi Program INKLUSI-BaKTI dan Pemerintah Kabupaten Maros. Selain pendataan disabilitas di Kabupaten Maros, forum juga terlibat penyusunan Peraturan Bupati Mengenai Penyandang Disabilitas sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Penyusunan peraturan bupati diperlukan untuk menjadi rujukan bagi Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Kabupaten Maros, sebagai amanah dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Melalui Program INKLUSI, pengorganisasian disabilitas juga dilakukan di tingkat desa dan kelurahan. Mitra BaKTI di delapan kabupaten/kota (Kabupaten Tana Toraja, Maros, Kupang, Lombok Timur, Kota Parepare, Kendari, dan Ambon) mengorganisir pembentukan dan penguatan kelompok yang disebut sebagai Kelompok Konstituen (KK). Di Kabupaten Kupang diberi nama Forum Pemerhati Desa (KPD), dan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi di Kota Ambon.

Pelibatan disabilitas sebagai pengurus dan anggota KK adalah langkah maju. Disabilitas, umumnya mengaku bahwa pelibatannya di dalam KK adalah pertama kalinya. Itu berarti, selama ini disabilitas tidak dianggap di dalam masyarakat, padahal jumlah mereka di desa/kelurahan tidak bisa diabaikan. Pendataan yang dilakukan di 102 desa/kelurahan, terdapat 15-30 orang dengan disabilitas tiap desa/kelurahan. Lebih dari itu, dan ini sangat fundamental bahwa, disabilitas adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.

Suara Disabilitas dalam Kebijakan

Di Kota Parepare, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan telah melibatkan disabilitas sejak tahun 2023. Usulan-usulan disabilitas, sebagaimana juga usulan perempuan dan anak menjadi perhatian sejak Musrenbang di tingkat kelurahan. Pemerintah Kota Parepare juga telah mengalokasikan dana yang disebut sebagai Pagu Indikatif Wilayah (PIW) untuk kelurahan, di dalamnya termasuk alokasi untuk disabilitas. Merujuk pada PIW, pemerintah kelurahan harus mengalokasikan anggaran sebesar 15% untuk perempuan, anak, dan disabilitas.

Kebijakan PIW untuk mengakomodasi usulan Musrenbang di tingkat kelurahan bukanlah sesuatu yang baru, tetapi kebijakan Pemerintah Kota Parepare untuk menegaskan alokasi anggaran dalam PIW untuk disabilitas adalah kebijakan yang harus diapresiasi.

Di Kota Ambon, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi yang dimulai pada 2023. Kebijakan ini untuk mengakomodasi kebutuhan dan

pemberdayaan kelompok yang di dalamnya menghimpun berbagai perwakilan, termasuk perempuan miskin, disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dan Kota Ambon barulah awal, tetapi itu telah membuka jalan dan contoh untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Membuat atau mengubah kebijakan untuk mengakomodasi suara disabilitas adalah keharusan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas, bukan karena rasa iba atau kasihan.

Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu membuat kebijakan khusus untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Selama ini kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota yang tersedia tidak memadai untuk mengakomodasi pemenuhan hak-hak disabilitas, bahkan kebijakan yang ada masih sangat ableis atau prasangka yang mendiskriminasi dan merendahkan disabilitas.

Aksesibilitas dan Akomodasi Layak

Partisipasi penuh di ruang publik dan pembangunan adalah hak disabilitas. Karena itu, baik individu maupun lembaga harus membuka ruang dan kesempatan untuk pelibatan dan partisipasi penuh disabilitas. Ketika melibatkan disabilitas maka perlu diperhatikan kebutuhan disabilitas untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi di ruang publik.

Dalam CRPD dan UUPD dikenal istilah Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 8 UUPD). Sedangkan CRPD menyatakan, agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, maka diperlukan kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di

daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain: (a) gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja; (b) informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat (Pasal 9).

Aksesibilitas berhubungan dengan Desain universal. Di dalam CRPD disebutkan, Desain universal berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan. Sedangkan Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 2).

Disabilitas dapat berpartisipasi dan terlibat dalam masyarakat untuk memperjuangkan dan mengadvokasi hak-haknya, jika lingkungan cukup aksesibel dan adanya akomodasi yang tersedia untuk disabilitas. Tempat pertemuan atau kegiatan memungkinkan disabilitas menjangkau dengan mudah, seperti jalan yang mempunyai jalur pemandu (*guiding block*) untuk disabilitas netra, terdapat bidang miring untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda. Untuk disabilitas tuli atau bisu, dibutuhkan juru bahasa isyarat (JBI) atau pendamping yang dapat menerjemahkan bahasa isyarat dari disabilitas, dan sebagainya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto: Instagram Lily Yulianti Farid

KAK LILY, WARISAN RUANG AMAN, DAN PERJUANGAN MELAWAN DOMINASI: SEBUAH OBITUARI

Oleh **AULIA ADAM**

Kepergian Lily Yulianti Farid membawa duka besar buat dunia literasi dan kebudayaan kita.

“Lily sudah tiada. *Innalillahi wainnailaihi rajiun*. Dia berangkat dengan tenang. Didampingi saya dan Fawwaz. Pukul 1 pagi hari Jumat 10 Maret 2023. Di Rumah Sakit Peter MacCallum Cancer Centre di Melbourne,” tulis Farid Ma’ruf Ibrahim, mengabarkan kepergian istrinya, Lily Yulianti Ibrahim, seorang penulis, peneliti, aktivis literasi, dan pendiri *Makassar International Writers Festival*.

Kabar itu mengejutkan banyak orang. Lily memang tengah sakit, melawan kanker ovarium. Namun, dari postingan terakhirnya di Instagram hampir sebulan sebelum kepergiannya, Lily masih tampak semangat dan bahagia menyambut proyek penelitian terbarunya, sebuah film dokumenter tentang hubungan suku Aborigin di Australia dan Makassar.

“Dia pergi, meninggalkan saya dan sahabatnya yang lain. Begitu Cepat,” tulis Aan Mansyur, penulis kenamaan asal Makassar yang adalah sahabat Lily.

Di Instagramnya, Aan mengenang Lily sebagai sahabat baik dengan mimpi yang sama. Mereka telah berkawan sejak Lily masih tinggal di Tokyo, delapan belas tahun lalu. “Kami memiliki sejumlah mimpi yang sama. Namun, baginya, harapan adalah sesuatu yang harus terus secara aktif dikerjakan,” tulis Aan, mengenang Lily.

Di Makassar, nama Lily memang besar dan harum karena kontribusinya di dunia literasi. Terutama setelah pada 2011 lalu, ia mendirikan Makassar International Writers Festival (MIWF). Di sana, ia merawat literasi dan komunitas penulis Timur. Mereka sering mengangkat dan mengkritisi ketimpangan di dunia literasi Indonesia yang masih bias Jawa-sentris.

Dedikasi dan Kecintaan pada Dunia Literasi

Tak cuma MIWF, bersama sutradara Riri Riza, Lily juga mendirikan *Rumata’ Artspace*, sebuah rumah budaya yang dikelola dengan sebagian besar pendanaan publik. Di sana mereka juga punya *South East Asian Screen Academy (SEAScreen)*, yang jadi tempat pelatihan dan pengembangan pembuat film di Makassar, merawat bahasa ibu Sulawesi Selatan lewat BASASulsel, dan merawat narasi lokal yang terpinggirkan di konteks nasional lewat *Bacarita Digital*.

Lily—yang akrab dipanggil Kak Lily oleh kawan-kawan terdekatnya—memulai karier sebagai jurnalis di Kompas pada 1995. Ia lalu melanjutkan karir di *Australian Broadcasting Corporation (Radio Australia dan Online News, Indonesian Service)*, *Japan Broadcasting Corporation*, dan *Morning Daily* Kompas.

Ketertarikan pada isu-isu gender, membuat Lily meneruskan pendidikan S2 di *Gender and Development Studies*. Dan meneruskan pendidikan doktoralnya di bidang Gender dan Media di Melbourne, Australia.

Lily juga dikenal sebagai penulis karya fiksi yang mengangkat kisah hidup perempuan-

perempuan di Makassar. *Makkunrai* dan 10 Kisah Perempuan Lainnya (2008) jadi kumpulan cerpen pertama Lily yang diterbitkan. Setelah itu, ia menulis *Family Room* (2010) dan *Ayahmu Bulan, Engkau Matahari: Sebuah Kumpulan Cerpen* (2012).

Penulis dan akademisi Intan Paramaditha mengenang Lily sebagai “*Partner in crime*” dalam mendobrak patriarki di dunia literasi Indonesia. Mereka pertama kali bertemu pada 2016, saat Intan baru pindah dari Amerika ke Australia. Bersama-sama, keduanya menginisiasi PERIOD, sebuah kelas menulis dan diskusi. Tujuannya untuk mempromosikan pikiran kritis dan kerja-kerja perempuan, penulis dari Timur Indonesia, dan suara-suara non-dominan.

“Mimpi kami sama: membuat lebih banyak lagi ruang seni dan budaya buat feminis, keragaman, dan non-Jawasentris,” tulis Intan di Instagramnya, mengenang sang sahabat.

Beberapa program PERIOD dibawakan Lily dan Intan di MIWF. Lily juga beberapa kali diajak Intan menyumbangkan pikirannya di Sekolah Pemikiran Perempuan, sebuah ruang aman kritis lain yang digagas Intan dan sejumlah perempuan penulis serta akademisi.

Saat mendapat kabar kepergian Lily, Intan tengah bersiap untuk mengajar. Hari itu, kelasnya akan membahas gender, *road movies*, dan *Thelma and Louise* (1991), sebuah film feminis tentang pertemanan perempuan. Intan tak bisa menahan tangis di tengah kelas.

“Kak Ly, terima kasih atas campur tangan feminisme dan MIWF sebagai warisanmu. Seperti *Thelma dan Louise*, kau akan “terus ada”. Perempuan-perempuan yang menyediakan ruang buat yang lain, seperti Toeti Heraty, sedang menunggu untuk merayakan hidupmu yang begitu berarti,” tutup Intan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah editor, produser yang terlibat jurnalisme sejak 2013. Ia menggemari pemikiran Ursula Kroeber Le Guin, Angela Davis, Zoe Baker, dan Intan Paramaditha.

Artikel ini bersumber dari <https://magdalene.co/story/kak-lily-warisan-ruang-aman-dan-perjuangan-melawan-dominasi-sebuah-obituari>

POPULASINYA SEMAKIN SUSUT, ANCAMAN KELESTARIAN HIU-PARI DI PERAIRAN ARU

Oleh **M JAYA BARENDS**

Gulungan ombak bertubi-tubi, sesekali diiringi angin kencang menerjang Pesisir Timur Pulau Wamar, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Di lepas pantai, tidak terlihat satupun kapal nelayan yang berani berlabuh.

Mayoritas kapal memilih berlindung pada sisi utara pulau tersebut. Ada juga yang memilih berlabuh di Pelabuhan Rakyat dan pesisir pantai, kawasan Pasar Timur. Semuanya menghindari gelombang musim barat yang sedang berkecamuk.

Salah satunya Haji Maron. Juragan kapal ini, memilih tidak mengoperasikan kapal semenjak Januari hingga Februari 2023.

“Kapal akan beroperasi kembali pada Maret–September. Fokusnya buat berburu telur ikan terbang dari keluarga *Exocoetidae*,” ujarnya kepada Mongabay. Sisanya di bulan Oktober–Desember, dia memancing segala jenis ikan, termasuk hiu pari (*elasmobranchii*).

Dia bilang, dulu memburu hiu pari ke laut Australia. “Memang sengaja masuk ke sana (Australia) sebab hiu pari (di sana) banyak,” jelasnya. “Saat itu, saya dapat sirip campuran hiu dan pari lebih dari satu ton.”

Sirip hiu pari yang dijumur di atas kapal nelayan di Desa Karei, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Dok: Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia



Dirinya masih ingat betul lokasi primadona hiu pari di perbatasan Indonesia–Australia. “Kalau perbatasan, hiu pari banyak,” ungkapnya sambil menyebut laut Arafura, merujuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-718).

Kini, dirinya tak pernah lagi masuk laut Australia. Dia mengaku tobat setelah dipenjara selama tiga bulan karena ditangkap polisi perbatasan Australia beberapa tahun silam.

Sirip hiu pari yang dijumur di atas kapal nelayan di Desa Karei, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Dok: *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia

Selain Maron, ada pula Mulianur. Semasa menjadi awak kapal, dia rutin menangkap hiu pari di perbatasan Indonesia– Australia. Namun semenjak jadi juragan hanya mencari telur ikan terbang.

Ketika berburu hiu pari, sebutnya menggunakan kapal berukuran 20 GT, awaknya berjumlah 8 orang. Sedangkan alat tangkap, yaitu jaring dasar



atau *liong bun* ukuran mata jaring 47–50 inch. “Khusus buat menjaring hiu pari,” katanya.

Bila jaring dilepas ke laut, jarak kapal 12–13 mil di antara pangkal Kepulauan Indonesia, laut Arafura dan teritorial Australia. Tak hanya menetap di perbatasan, terkadang kapal berpindah–pindah mengejar tangkapan. Misalnya berlayar sampai ke Merauke. Dia mengaku bisa melaut sampai berbulan-bulan.

Seingatnya, rata–rata hasil tangkapan hiu pari bisa mencapai 1.300–1.050 ekor sekali beroperasi. Jenisnya, selain hiu ada juga pari kekeh (*wedgefish*) dan pari kikir (*giant guitarfish*). Khusus yang berkualitas super, sebutan bagi jenis hiu pari yang masuk Appendiks II CITES, sirip dan ekornya bisa sampai berukuran 25–45 cm. Untuk yang non Appendiks CITES atau look alike species katanya bisa sampai 70 cm.

“Kalau hiu pari dilindungi tersangkut jaring pasti kita lepas. Tidak berani ambil,” dalihnya. Yang disebutnya itu adalah pari gergaji (*Pristis*

spp) yang masuk dalam daftar Appendiks I CITES, statusnya dilindungi berdasarkan Kepmen KP 1/2021. Selanjutnya, hiu paus (*Rhincodon typus*) Appendiks II CITES, dilindungi penuh sesuai Kepmen KP 18/2013.

Kala itu, keuntungan tidak serta–merta diraup oleh juragan sepenuhnya. Melainkan harus menutupi beban operasional mencapai 160 juta rupiah. Uang itu hasil pinjaman dari pihak ketiga. “Kalau rejeki bagus, masing–masing awak kapal bisa kebagian 60 juta rupiah. Tapi kadang juga habis buat ganti biaya operasional,” katanya.

Maron dan Nursalam, dua dari ribuan nelayan yang memburu hiu pari di Laut Aru dan Arafura. Mengutip Buku Hiu dan Pari terbitan Balai Riset Perikanan Tangkap 2009, menyebut armada jaring liong bun sekitar 60 persen telah berpindah dari Laut Jawa ke Sulawesi dan Arafura yang potensinya lebih menggiurkan.

“Penangkapan hiu dalam setahun berlangsung dari Maret–Mei dan September–



Seorang awak kapal tengah memotong tubuh hiu di salah pelabuhan tak resmi yang dimanfaatkan membongkar hasil tangkapan di Pelabuhan Rakyat Pasar Timur, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. (atas)

Dok: Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia

Sirip hiu karang (*Carcharhinus Melanopterus*) yang masuk kategori non Appediks CITES. (bawah)

Foto: M Jaya Barends

November,” tulis buku itu. Khusus puncak penangkap pari adalah di bulan Maret, Mei dan April.

Menurut peneliti IUCN *Species Survival Commission (SSC)-Shark Specialist Group*, Benaya Meitasari Simeon, WPP 718, adalah salah satu *golden fishing ground* di Indonesia. perairannya subur sehingga banyak habitat keanekaragaman hayati laut termasuk hiu pari.

“Jika ditanya jenis apa paling dominan, akan sulit disebutkan. Namun di WPP 718, masih ditemui pari gergaji,” ujar Benaya. Selain itu, sebutnya ada pari kekeh dan kikir yang berkerabat dengan pari gergaji.

Berdasarkan riset, dia menyatakan perilaku curang para pelaut di WPP 718 adalah menyembunyikan tangkapan pari gergaji, terutama bagian moncong (snout) gergaji yang dipotong duluan.

“Kemudian sirip dan potongan tubuh dicampur bersama pari kekeh dan kikir,” ujarnya. Upaya menutupi tangkapan ilegal umumnya masif dan berlapis. Dari tingkat nelayan, awak kapal, kapten hingga pengepul.

Susut Populasi, Zonasi Tangkap Terhimpit

Akhir Februari 2023, Mongabay Indonesia bertemu seorang kapten kapal pemburu hiu pari di Dobo. Pria berbadan gempal itu sedang merakit jaring rawai dasar.

“Jaring rawai dapat hiu pari sedikit. Yang banyak jaring dasar tetap (*liong bun*) segala jenis pari kikir, kekeh dan segala jenis hiu semua pasti terjaring,” katanya.

Dia mengatakan, di pasaran Kota Dobo, sirip plus ekor dipatok pengepul dan pembeli bervariasi. Dinilai berdasarkan panjang sirip plus ekor dari masing-masing jenis hiu dan pari.

Misalnya harga sirip plus ekor hiu non Apendiks CITES atau *look alike species*, ukuran rata-rata 45 cm harganya di kisaran 1,6 juta rupiah.

Untuk pari kikir, dengan panjang sirip plus ekor 40 cm dihargai 2 juta rupiah lebih. Harganya masih bisa turun atau naik bila ada perbedaan 5 cm. Begitu juga pari kekeh 2 juta rupiah lebih.

“Tapi sekarang susah dapat pari kekeh ukuran sirip 35-40 cm. Biasanya, 15 cm terkecil,” keluhnya.

Keluhan kapten kapal itu, tentu beralasan. Bagaimana tidak, pari kekeh terkenal dengan tingkat pertumbuhan yang lambat, dari segi fisik maupun reproduksi.

Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, menyebut setiap tahun rata-rata dihasilkan 18,6 ton sirip hiu kering dengan berbagai ukuran dari Laut Aru. Termasuk pari kikir dan kekeh. Padahal sering disebut jenis hiu pari adalah hasil tangkapan sampingan (by catch). Harga sirip elasmobranchii akan melonjak berkali lipat bila diekspor ke luar negeri, khususnya jenis sirip pari kikir.

Sebagaimana di pusat perdagangan sirip dan ritel Global Hongkong, merujuk hasil studi WCS dan *Human Society International 2018*, sirip pari kekeh nilainya tertinggi daripada sirip jenis lainnya.

Hasil tangkapan di perairan Pulau Wamar, Aru telah menyusut sejak 10 tahun terakhir. Wilayah jelajah mencari ikan pun makin jauh. Hal ini dikemukakan oleh Poly Pitkaem, nelayan yang tinggal di Kelurahan Siwalima, tempat bermukimnya para nelayan di Dobo.

Dia bilang, kini harus mencari ikan sampai ke perairan Pulau Toba, Kecamatan Aru Tengah Selatan. Kemudian Tanjung Pamali dan Pulau Jedan, Kecamatan Aru Selatan Timur.

“Terkadang juga bisa sampai ke Pulau Eno dan Pulau Karang, dekat perbatasan Indonesia-Australia,” ujarnya. Itupun, tak lebih dari 10 ekor tenggiri bila sudah sulit.

Dia mengklaim, salah satu penyebab ikan menyusut karena tidak ada lagi perbedaan zonasi wilayah tangkap di antara kapal *Gross Tonnage* (GT) kecil dan besar.

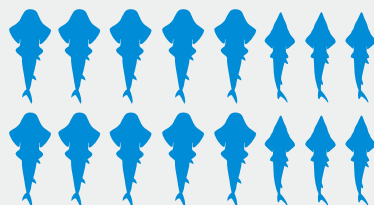
Pengawasan Hiu Pari dan Kapal tak Berizin

Sementara itu, Yassar, Pengawas Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual Wilayah Kerja Dobo mengaku belum pernah dapat kapal penangkap hiu pari yang terafilias dengan pelaku usaha pemegang Surat Izin Pemanfaatan Ikan Dilindungi (SIPJI).

“Itu [SIPJI] belum ada. Padahal di SIPJI kan muncul berapa jumlah kuota tangkapnya. Nah, 2022-23 termasuk tahun di tahun-tahun sebelumnya gak ada [daftar pemegang SIPJI] di kita,” ungkapnya (15/2/2023).

Padaحال Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, mengisyaratkan dalam perdagangan dalam negeri, pengusaha harus memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) sesuai dengan kuota tahun berjalan.

FAKTA



16
spesies

**Tumbuh lambat
Terlambat Dewasa
Kehamilan panjang**



**Hidup di daerah
pesisir dan pantai**

80%

**Penurunan populasi
pada sebagian
besar spesiesnya**



**Nilai jual siripnya tertinggi
diantara Ikan Hiu dan Ikan Pari
USD \$964/kg**



**Di jual di Hong Kong
& Cina sebagai sup
sirip hiu Qun Chi**

**Dagingnya sering
di konsumsi oleh
masyarakat pesisir**



**Sirip kering yang
belum diproses mudah
di identifikasi**

Infografis perdagangan pari kekeh dan pari kikir di pasar dunia yang menyebabkan populasi keduanya turun.
Grafis: Yayasan BaKTI berdasarkan Gulf Elasmobranch Project - Rima W. Jabado/citesshark.org

Selama pengawasan, Yassar bilang kapal penangkapan hiu pari hanya mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku. Sebab rata-rata kapal penangkap hiu pari dari ukuran 30 GT ke bawah.

Saat mengirim muatan sirip hiu daging, tulang, kulit dan turunannya, Pemegang SIPJI diwajibkan mengurus Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) – Dalam Negeri, dan surat rekomendasi untuk jenis-jenis *look alike species*.

Meski begitu, Yassar mengaku rutin melakukan pengawasan. Instrumen pengawasan melalui *e-logbook* dari hasil tangkapan.

“Misalnya ada jenis hiu pari yang dilindungi, kita turun periksa. Apalagi hiu pari yang sudah di potong sirip, kulit dan cuma tersisa daging agak sulit buat diidentifikasi.”

Pengawasan serupa juga dilakukan ke 12 Unit Pengelolaan Ikan (UPI) di Kota Dobo. Jadwalnya sebulan dua kali.

Di luar faktor pengawasan penangkapan hiu pari, Yassar mengungkap, banyak kapal tak berizin terutama kapal pencari telur ikan. Saat berlayar, mereka kerap sembunyi-sembunyi dari pengawasan petugas.

“Karena izinnya mereka gak ada. Dari Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Maluku itu kan belum mengeluarkan izin untuk menangkap telur ikan. Di permen KP juga tidak ada yang mengatur alat tangkapnya,” jelas Yassar.

Pernyataan Yassar dibenarkan Reynaldo Hiariej, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Gugus Pulau IX, Kepulauan Aru. Reynaldo mengatakan, ada sejumlah pengusaha yang kapalnya tanpa memiliki SIPI.

Ukuran kapal mayoritas dibawah 30 GT, kewenangan mengeluarkan izin ada di Pemerintah Provinsi Maluku. “Rata-rata tidak punya SIPI” ungkapnya. Jumlah kapal diperkirakan, mencapai ratusan armada. Kapal biasa beraktivitas saat musim mencari telur ikan, yaitu Maret–September.

Dia melanjutkan, sebagian dari kapal-kapal tersebut sesekali mencari hiu pari, dengan menggunakan jaring rawai dasar.

“Kita sudah berusaha memanggil pemilik

kapal, tapi mereka tak patuh,” jelasnya.

Berdasarkan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) di Kabupaten Kepulauan Aru, kapal yang baru tercatat berukuran 1-10 GT totalnya 492 kapal. Sedangkan kapal 12-30 GT mencapai ratusan. Hasil tangkapan, mulai cumi, udang dan bermacam jenis ikan termasuk hiu pari.

Pemilik SIPJI di Aru

Kepada Mongabay Indonesia, Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (Loka PSPL) Sorong, Santoso Budi Widiarto menyatakan, berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka data pemegang SIPJI dan kuota akan diberikan berdasarkan permintaan data dari para pemangku kepentingan terkait.

“Hingga saat ini belum ada permintaan data Pemilik SIPJI dari Pangkalan PSDKP Tual Wilayah Kerja Dobo,” ungkapnya.

Dia mengatakan, berdasarkan database Desember 2022, terdapat 8 pemilik SIPJI di Kabupaten Kepulauan Aru. Jumlah kapal yang didaftar untuk permohonan kuota tahap I 2023 tercatat sebanyak 36 armada.

Selain itu, seluruh aktivitas pelaku usaha selalu terpantau. Mereka, rutin foto, mulai dari aktivitas penangkapan hingga pemanfaatan badan hiu pari.

Berdasarkan data Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon, Wilayah Kerja Dobo, selama tahun 2022 terdapat 55 pengiriman sirip hiu dari Januari-November. Totalnya 24.963 kg, dengan nilai taksiran Rp 2.346.688.000.

Daerah tujuan masing-masing Surabaya, Bitung, Manado, Probolinggo dan Jakarta Utara. Surabaya menempati posisi pertama, terdapat 47 pengiriman dalam setahun.

Kepala BKIPM Ambon, Hatta Arisandi mengaku, pelaku usaha patuh mengurus Surat Karantina Ikan (SKI), saat melakukan pengiriman sirip hiu pari. “Terbukti dari data tersebut,” ujarnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://www.mongabay.co.id/2023/03/13/populasinya-semakin-susut-ancaman-kelestarian-hiu-pari-di-perairan-aru/>

INGIN PERBAIKI KUALITAS PENGAJARAN? KUNCINYA AMATI INTERAKSI GURU & MURID LANGSUNG DI RUANG KELAS

Oleh **SYAIKHU USMAN & ASRI YUSRINA**

Menteri Pendidikan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim awal tahun ini memaparkan hasil Asesmen Nasional 2021-sistem evaluasi capaian dan kualitas pembelajaran yang menggantikan Ujian Nasional (UN). Hasilnya, dari 6,5 juta murid kelas 5, 8, dan 11 yang terlibat, separuh berkemampuan literasi kurang dan dua pertiga berkemampuan numerasi rendah.

Asesmen baru ini tentu menawarkan cara baru mengevaluasi capaian murid dan kualitas pengajaran guru di Indonesia dengan meninjau beragam faktor penting. Ini termasuk pengukuran kompetensi dasar dan karakter siswa hingga survei terkait lingkungan belajar mereka.



Foto: Yayasan Bakti/Yusuf Ahmad

Sayangnya, satu hal yang jarang masuk dalam instrumen asesmen seperti ini, meski sangat penting, adalah observasi belajar-mengajar langsung di ruang kelas.

Padahal, penelitian di Pakistan menemukan bahwa hasil pengamatan langsung atas proses pengajaran justru lebih penting dalam meningkatkan prestasi murid – bahkan lebih berpengaruh ketimbang karakter dan kualifikasi guru seperti sertifikasi, umur, dan pendidikan mereka.

Seperti apa sistem observasi kelas ini, dan bagaimana pembuat kebijakan bisa menerapkannya untuk meningkatkan kualitas pengajaran di Indonesia?

Observasi Guru dan Murid di Kelas

Di dunia pendidikan global, beberapa instrumen telah dikembangkan untuk observasi kelas. Pada awal 2022, misalnya, program *Research on Improving Systems of Education* (RISE) Internasional menyusun beberapa indikator – termasuk perilaku guru, penggunaan materi dan fasilitas kelas, interaksi dan dukungan emosional, hingga budaya kelas – untuk mengamati guru dan teknik mengajar seperti apa yang efektif.

Para peneliti mengamati faktor-faktor tersebut pada 106 sekolah di Tanzania. Mereka menemukan bahwa indikator-indikator tersebut bisa menangkap beberapa aspek kualitas pengajaran guru yang dapat berpengaruh pada capaian belajar murid. Hal-hal ini bisa jadi tidak akan tertangkap dalam asesmen biasa yang tidak melibatkan observasi kelas.

Misalnya, studi menemukan bahwa bagi guru dengan penguasaan materi yang sudah baik, mengasah teknik mengajar mereka bisa membuat murid meraih skor ujian tinggi. Namun, bagi mereka yang penguasaannya rendah, prioritasnya adalah memperbaiki penguasaan materi terlebih dulu serta meningkatkan jam terbang di kelas, sebelum teknik mengajar mereka bisa berdampak pada capaian siswa.

Mengingat pentingnya observasi kelas semacam ini, kami di program RISE Indonesia menyusun pedoman serupa dengan yang

diterapkan di Tanzania, bernama *Classroom Observation Tool for Assessing the Dimensions of Teaching Practices* (CERDAS).

CERDAS memetakan pola mengajar guru, terutama di tingkat dasar (SD). Desainnya merujuk pada prinsip-prinsip dalam alat evaluasi guru nasional dan beberapa instrumen observasi di negaralain.

Penilaian CERDAS terbagi dalam tiga tahap observasi pembelajaran, yakni saat memperkenalkan materi, inti pelajaran, dan penutup. Pengamatan dilakukan beberapa kali dengan tiap jendela observasi 1-2 jam dengan menanyakan 4 poin penting: ① sejauh mana guru menerapkan struktur pembelajaran; ② bagaimana jenis interaksi guru dan murid; ③ seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru; dan ④ seperti apa suasana kelas yang terjadi.

Dalam salah satu studi RISE Indonesia, misalnya, kami memakai instrumen CERDAS untuk mengevaluasi kinerja 114 kandidat guru dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mengajar kelas 1-6, ditambah data terkait capaian akademik mereka.

Hasilnya, sepertiga guru dengan nilai seleksi PPG terbaik (nilai tes masuk *online*, nilai wawancara, dan IPK S1) belum tentu melakukan praktik pengajaran yang baik dalam mendukung pembelajaran.

Kami juga mendapatkan beberapa wawasan menarik. Salah satunya, praktik pengajaran sepertiga guru dengan nilai teratas dan sepertiga guru dengan nilai terbawah, ternyata relatif sama. Kurikulum yang terlampau padat membuat semua guru mempunyai ruang terbatas untuk mengeksplorasi teknik mengajar yang baik – hal penting yang bisa menjadi evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Observasi Kelas Sebagai Pusat Manajemen Pengajaran

Kami merekomendasikan agar sistem observasi kelas menjadi pusat manajemen perbaikan mutu pengajaran di Indonesia. Untuk itu, observasi kelas perlu menjadi kegiatan rutin dan berkala.

Penelitian di Pakistan menemukan bahwa hasil pengamatan langsung atas proses pengajaran justru lebih penting dalam meningkatkan prestasi murid – bahkan lebih berpengaruh ketimbang karakter dan kualifikasi guru seperti sertifikasi, umur, dan pendidikan mereka.

Bagaimana Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatannya?

Beberapa contoh yang bisa sekolah terapkan, misalnya, adalah memasang CCTV dan perekam suara di beberapa kelas yang menjadi ruang observasi.

Tentu demi transparansi dan privasi, keberadaan dan tujuan pemasangan alat ini harus diketahui semua guru – tapi tanpa memberi tahu mereka kapan observasi akan berlangsung. Tujuannya adalah untuk menghindari ‘efek *Hawthorne*’. Guru yang mengetahui bahwa ia sedang diobservasi, justru bisa sengaja mengubah perilakunya dan bertindak tidak alami.

Setelah semua sarana dan prasarana observasi terpasang, kepala sekolah atau tim evaluasi mengobservasi semua guru minimal sebulan sekali.

Segera setelah observasi kelas, kepala sekolah membahas kekuatan dan kelemahan pengajaran bersama guru yang bersangkutan. Dengan itu, sekolah dapat memberikan saran perbaikan, bantuan, atau pelatihan kepada guru.

Di samping itu, setiap bulan sekolah mengadakan pertemuan dengan semua guru untuk mendengar pemaparan dan membahas informasi hasil seluruh observasi. Pertemuan bulanan ini merupakan forum pembelajaran bersama yang bertujuan mendorong guru memperbaiki diri sendiri.

Akumulasi data hasil observasi kelas di berbagai sekolah juga dapat dipakai oleh dinas pendidikan daerah atau tim riset di lembaga penelitian atau universitas untuk memperkuat kebijakan pendidikan berbasis bukti. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun bisa memanfaatkan akumulasi data daerah untuk melengkapi informasi hasil Asesmen Nasional.

Tak hanya itu, hasil observasi kelas dapat pula dijadikan materi kuliah calon guru di universitas keguruan (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, atau LPTK) dan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai bahan persiapan mereka sebelum melakukan latihan praktik mengajar.

Upaya Perbaikan Mutu Pengajaran Perlu Gotong Royong

Membangun budaya observasi kelas sebagai bagian kunci dalam manajemen pengajaran adalah kerja besar, yang butuh biaya besar pula.

Namun, dinamika di ruang kelas sangat penting untuk kita pelajari karena merupakan ‘tempat kejadian perkara’ yang sangat menentukan kualitas pembelajaran.

Kemendikbudristek tentu bertanggung jawab untuk mengawasi dan memperbaiki mutu pengajaran ini. Namun, mereka tidak bisa bekerja sendiri, terlebih setelah Badan Penelitian dan Pengembangannya (Balitbang) terserap ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akhir tahun lalu.

Pelaksanaan asesmen observasi kelas secara nasional membutuhkan gotong royong dari kementerian, BRIN, universitas keguruan, hingga dinas pendidikan daerah.

Kemendikbudristek kemudian bisa mengelola hasilnya menjadi bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait pembelajaran, guru, dan sekolah. Mengevaluasi data interaksi guru-murid secara rutin dan berkala akan membantu sekolah dan segenap pemangku kepentingan pendidikan memperbaiki capaian edukasi di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://theconversation.com/ingin-perbaiki-kualitas-pengajaran-kuncinya-amati-interaksi-guru-dan-murid-langsung-di-ruang-kelas-194919>



MAGDOLENE

'AGING SOCIETY' DAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Oleh **JASMINE FLORETTA V.D**

Populasi penduduk lansia semakin bertambah, tapi pemerintah Indonesia tampaknya masih belum memberi perhatian khusus untuk kesejahteraan mereka.

Kini usiamu menginjak 70 tahun. Berbeda dengan bayangan tentang masa tua yang nyaman, kamu justru hidup dengan kondisi sebaliknya. Tak ada pasangan, anak-anak sibuk dengan keluarga baru masing-masing, kamu sendirian.

Ingin membunuh kesepian dengan bekerja menyibukkan diri, ternyata kesehatanmu tak lagi memungkinkan. Penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan peradangan sendi jangka panjang, membuatmu kurus dan susah beraktivitas. Bahkan untuk sekadar berjalan dari kamar hingga keluar teras rumah pun kamu kesulitan. Alhasil, waktu tuamu habis untuk berbaring di ranjang. Sementara, kesehatan mental semakin turun, dan kamu kehilangan motivasi untuk hidup.

Kondisi ini diperparah dengan keuanganmu yang cekak. Tabungan yang susah payah dikumpulkan bertahun-tahun, habis untuk mengobati penyakitmu. Untuk menyambung hidup dari hari ke hari, kamu pasrah mengandalkan bantuan orang lain.

Skenario di atas bukan adegan film atau serial *dystopia* terbaru, melainkan prediksi situasi terburuk untukmu di 2045. Tahun itu, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebesar 70 persen penduduk usia produktif. Namun, tahun itu pula, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprediksi Indonesia akan mulai memasuki *aging society* atau masyarakat menua, yang ditandai lewat lonjakan jumlah penduduk lanjut usia.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dikutip dari Antaranews mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik 2021, jumlah lansia usia 60 tahun ke atas sebesar 10,8 persen atau sekitar 29,3 juta orang. Angka tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga 19,9 persen pada 2045.

Dengan laju penuaan populasi yang jauh lebih cepat daripada di masa lalu, World Health Organization (WHO) dalam artikelnya *Ageing and Health* menjelaskan, semua negara akan menghadapi tantangan besar. Khususnya dalam memastikan sistem kesehatan dan sosial mereka siap memanfaatkan perubahan demografis tersebut.

Dengan berbagai tantangan hari tua, banyak orang yang menyadari ini dan mempersiapkan diri sedari muda. Danny Yatim, lansia berusia 65 tahun, salah satunya. Ia pun masih terbilang aktif bekerja paruh waktu sebagai penulis, penerjemah, dan dosen Psikologi di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.

Secara fisik, ia masih cukup bugar. Walau sendi sudah mulai sakit akibat faktor usia, ia menolak untuk dimanjakan dan dianggap lemah. Ia berjalan kaki sehari-hari dan berolahraga rutin. Bukan tanpa alasan Danny memilih gaya hidup begini. Ia mau tetap mandiri dan sehat secara

mental maupun fisik di usia kepala 7, kepala 8, dan seterusnya.

Dari segi finansial, kata Danny, uang yang didapat dari pekerjaan, ia tabung untuk menjalani hari tua dan menghadapi masa depan yang tak menentu. Ia juga berinvestasi, menabung deposito di bank, tak lupa menyisihkan uang untuk tetap membayar premi asuransi kesehatan.

Di sela-sela kesibukannya melakukan pekerjaan, ia tetap menyempatkan diri untuk berkumpul dengan lansia sebaya di café kekinian sembari bernostalgia. Kata pria lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), Connecticut College, dan Harvard University bidang Psikologi itu, berkumpul membantu otaknya tetap bekerja dan tak mudah pikun.

Tak cuma itu, ia masih menyempatkan diri belajar hal baru, termasuk Bahasa Korea dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).

“Ini bukan hal yang memberatkan, tidak ada *pressure* untuk jadi hebat. Ini saya lakukan agar bisa tetap aktif. Saya percaya kalau kita mencintai hidup, hidup akan mencintai kita. Kalau kita pasif, cuma di rumah, enggak ngapa-ngapain, ya kita bakal cepat mati. Enggak sehat itu,” jelasnya pada Magdalene.

Cara Danny mempersiapkan dan menjalani hari tua memang patut diacungi jempol. Dengan caranya, Danny secara ideal telah memastikan kesejahteraannya sendiri. Sayangnya, tak semua orang punya *privilege* yang sama dengannya. Tak punya pendidikan, pekerjaan yang layak, apalagi pendapatan untuk membayar premi asuransi kesehatan dan jaminan pensiun.

Sukarsih adalah perempuan lansia yang kini tinggal sendirian di rumah kecilnya di kawasan padat penduduk Depok, Jawa Barat. Berkebalikan dengan Danny, perempuan berusia 75 tahun itu harus menjalani kehidupan tuanya dengan kondisi yang sulit.

Ia menjanda sejak 1985, sang suami meninggal akibat serangan jantung. Akibatnya, ia terpaksa harus memerankan dua peran sekaligus: Ibu dan pencari nafkah tunggal. Setiap pekerjaan

yang bisa ia dapatkan ia jalani. Mulai dari penjaga toko di Sarinah, staf dapur di rumah sakit, jualan makanan ringan dan siap saji, hingga menjadi ibu-ibu kantin. Dengan beban tanggungan ini, ia tak sempat menabung untuk dirinya sendiri di hari tua. Apalagi terpikir membayar premi asuransi kesehatan. Untuk bisa makan dan punya tempat tinggal saja sudah syukur katanya.

Kondisi tak ideal itulah yang membuat ia terpaksa tetap bekerja keras bahkan saat berusia 60 tahun. Anak-anaknya yang telah dewasa tak bisa diandalkan secara finansial. Keempatnya hidup pas-pasan. Anak keempat Sukarsih menggantungkan nasib sebagai tukang ojek dengan pendapatan tak tentu untuk dua anaknya yang masih kecil.

Saat usia 70 tahun, ketika sendi kaki mulai sakit sehingga harus menggunakan tongkat, keadaan Sukarsih semakin terpuruk. Ia berhenti bekerja. Merelakan satu-satunya pendapatan yang bisa membuat Sukarsih bisa mandiri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa membebani anak-anak.

Kini sudah lima tahun ia bergantung dengan uang Rp800 ribu pemberian anak sulungnya. Kadang tak bulat Rp800 ribu karena anaknya juga punya kebutuhan seabrek buat keluarga sendiri. Jumlah ini jelas tak ideal untuk hidup di kota besar macam Depok. Sekali dua kali ia mendapat bantuan sembako dari pemerintah desa, tapi kualitasnya sangat jelek hingga tak layak makan.

“Buat makan seminggu aja seratus ribu. Belum kebutuhan bulanan kaya beli sabun cuci piring, wipol (pembersih lantai), beras, minyak. Terus listrik dua ratus ribu. Kalau ada tetangga hajatan atau meninggal masa enggak ngasih? Uang segitu mana cukup. Mana bansos (bantuan sosial) yang dikasih cuma saudara-saudara RT RW saja,” tukasnya pada Magdalene.

Sukarsih pernah beberapa kali tak punya uang sama sekali untuk membeli beras. Walhasil ia pun cuma bisa bergantung pada belas kasih saudara dekat rumah atau tetangganya.

Kesehatan Sukarsih yang semakin menurun

juga membuat keadaannya semakin rentan. Tak hanya sendi yang semakin sakit, penyakit hipertensi dan asma sering “kambuh” semenjak ia jadi lansia. Pada 2020, ia bahkan hampir kehilangan nyawa sendiri. Saat itu hipertensinya kambuh, darahnya sudah hampir masuk ke otak, membuat ia jatuh di depan kamar mandi. Beruntung ada tetangganya yang sedang main ke rumah, sehingga ia bisa cepat dibawa ke rumah sakit.

Sukarsih jarang mengecek kesehatannya. Bukan karena malas, tetapi akses menuju Puskesmas terdekat sulit dijangkau. Ia punya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tapi apa gunanya jika ia susah melakukan mobilisasi ke fasilitas perawatan kesehatan.

Sukarsih yang punya kerentanan berlapis-tinggal sendiri dan status ekonomi rendah—tentu saja tak sendiri. Menurut laporan “Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021” yang diterbitkan BPS, jumlah lansia seperti Sukarsih sekitar 9,9 persen. Itu setara dengan 1 dari 10 jumlah penduduk lansia dengan perempuan lansia sendiri jumlahnya lebih banyak dari laki-laki, yaitu sekitar 14,78 persen sedangkan laki-laki 4,74.

Lebih lanjut, menurut kondisi ekonominya, penduduk lansia juga lebih banyak berada pada status ekonomi rendah. Pada 2021 tercatat sebanyak 43,29 persen lansia berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan 19,31 persen pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Khotimun Sutanti, Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK dan Anggota Koalisi Masyarakat Peduli Keberlanjutanusiaan (KuMPuL) mengatakan pada Magdalene, kondisi lansia sangat memprihatinkan. Mereka umumnya masih jauh dari kata sejahtera.

Para lansia ini rentan tidak tertolong saat mengalami sakit, juga berpotensi terlantar dalam pemenuhan kebutuhan dan hak dasar, seperti

pangan atau perlindungan sosial. Situasi pandemi juga semakin memperparah kondisi lansia di Indonesia. Dalam penuturan Khotimun sesuai dengan kerja lapangan LBH APIK, banyak lansia yang tidak mendapatkan bansos dari pemerintah daerah. Sebab, banyak lansia yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga anaknya walau tinggal terpisah.

“Anaknya enggak di situ dan keadaannya miskin. Harusnya dia mendapatkan bansos sendiri tapi enggak bisa karena terkendala data ini. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, lebih dari 100 lansia diadvokasi oleh legal LBH Apik, sehingga akhirnya mendapatkan bantuan. Tapi, ya, mayoritas seringkali tetap tidak terdeteksi dalam data kelompok yang mendapatkan bansos dan jaminan sosial,” jelasnya.

Senada dengan temuan lapangan LBH APIK, dalam penelitian SMERU pada 2020, di tingkat nasional dalam rumah tangga dengan lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, baru sekitar 46 persen yang mendapatkan bantuan sosial.

DKI Jakarta jadi salah satu provinsi yang dinilai punya kebijakan pro-lansia bahkan tercatat hanya sekitar 23 persen lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang mendapatkan bansos.

Sri Murnianti, salah satu peneliti SMERU menambahkan, hanya sekitar 12 persen lansia yang memiliki akses terhadap program perlindungan sosial berbasis kontribusi berupa jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk dana pensiun untuk pegawai negeri. Sementara itu, lansia yang menerima manfaat program perlindungan sosial berbasis non-kontribusi atau bansos hanya sekitar 2 persen dari seluruh penerima program perlindungan sosial.

“Untuk jaminan hari tua pada studi yang kami lakukan, tidak ada seorang pun responden lansia di wilayah studi kami yang memilikinya. Mereka tidak pernah menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga tidak memiliki jaminan pensiun ataupun jaminan hari tua.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari pekerjaan yang mereka geluti sebelumnya, yakni bekerja di sektor informal,” jelas Murni.

Pada 2021 tercatat sebanyak 43,29 persen lansia berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan 19,31 persen pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Selain kondisi ekonomi dan status tinggal lansia, identitas gender lansia juga memengaruhi kerentanan mereka. Lansia perempuan lebih rentan dibandingkan dengan lansia laki-laki. Bukan saja karena jumlahnya yang lebih tinggi, tetapi mereka berpotensi mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dikutip dari siaran pers Komnas Perempuan Oktober 2022, mitos bahwa perempuan menopause tidak mungkin jadi sasaran kekerasan seksual berakibat pada korban perempuan lansia tidak mendapatkan perhatian khusus. Pemantauan media massa pada 2020 memberitakan 10 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan lansia, dengan usia tertinggi adalah 76 tahun.

Cerita tentang kerentanan perempuan lansia ini juga muncul dalam pengaduan kasus yang diterima LBH APIK. Sayangnya, menurut Khotimun, masyarakat masih memandang kekerasan seksual pada lansia tidak sepenting yang menimpa penduduk usia muda.

“Terkadang lansia malah ditertawakan. ‘Masa, sih?’ Dianggap tidak mungkin dan padahal kasusnya banyak,” tukasnya.

Kebijakan Hukum yang Belum Memihak Lansia

Kerentanan berlapis lansia ini semestinya dijadikan perhatian khusus pemerintah. Sayangnya menurut Deshinta Vibriyanti, peneliti isu lansia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional RI, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih belum memperlihatkan keseriusannya terhadap lansia.

Hal ini terlihat dari bagaimana satu-satunya kebijakan hukum tertinggi, yaitu undang-undang

terkait lansia hanya tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-undang yang Deshinta nilai sudah sangat ketinggalan zaman dan tidak bisa menjawab perubahan sosial baru terkait lansia. Deshinta mencontohkan bagaimana asas partisipatif dan berkelanjutan tidak jadi fondasi utama dalam undang-undang ini.

Simpelnya, dalam undang-undang ini tak ada pasal-pasal yang secara spesifik mengacu pada hak partisipasi lansia. Berikut juga pasal-pasal dalam undang-undang ini masih belum memakai paradigma pembangunan berkelanjutan.

Padahal menurut Deshinta, partisipasi lansia dalam pembentukan kebijakan atau penyusunan program sangat dibutuhkan. Ini karena lansia sendiri yang mengerti paling mengerti keadaan serta kebutuhan mereka.

“Di tingkat rendah, seperti musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), keterlibatan lansia sebenarnya harus jadi pertimbangan. Kekuatan lansia harus diangkat, ditonjolkan, tapi nyatanya enggak, kan. Mereka tidak diikutsertakan dan di undang-undang tidak diatur agar partisipasi ini bisa bersifat mandatory,” jelas Deshinta.

Selain itu, keberlanjutan juga tak kalah penting. Dalam hal ini, program-program lansia tidak hanya terfokus pada pemberian bansos berupa dana tunai. Namun juga penguatan keterampilan dan pelayanan perawatan jangka panjang yang bisa mendukung kesejahteraan mereka.

Deshinta menyangkan dengan kekurangan ini, penggodokan revisi Rancangan UU No. 13 Tahun 1998 ini belum juga mencapai titik terang. Bahkan tak masuk dalam daftar dalam Prioritas (Prolegnas) 2023.

Parahnya, pada 2020, Komnas Lansia dinyatakan wafat. Komnas lansia memang namanya tidak setenar Komnas HAM dan Komnas Perempuan, tetapi Komnas ini sempat dibentuk berdasarkan keputusan presiden pada tahun 2004. Setelah berkiprah selama 16 tahun,

komisi ini resmi dibubarkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 26 November 2020.

Marya Yenita Sitohang, peneliti isu lansia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional RI mengungkapkan, alasan pembubaran karena pertimbangan ‘perampangan’ birokrasi, dan kurang terlihatnya kinerja dari komisi tersebut. Namun, terlepas dari alasan pembubaran Komnas Lansia, ia sangat menyangkan tindakan pemerintah. Mengingat fungsi Komnas Lansia sangat penting dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan memberi pertimbangan pada presiden terkait upaya mewujudkan kesejahteraan lansia.

Sebelum ada Komnas Lansia, besarnya jumlah penduduk lansia di Indonesia telah diantisipasi sejak zaman Orde Lama melalui bantuan penghidupan orang jompo. Namun demikian, menjamin kesejahteraan lansia tidak dapat dilakukan dalam satu dua cara saja. Tak cukup dengan bantuan uang tunai, tapi juga bantuan psikologis dan kesehatan yang perlu dipenuhi agar mereka lebih sejahtera.

“Nyatanya permasalahan dan upaya mewujudkan kesejahteraan lansia tidak pernah sederhana. Namun, kurang ‘seksinya’ topik lansia di kalangan pemangku kebijakan menjadi tantangan tersendiri. Wafatnya komnas lansia menjadi salah satu buktinya,” ungkap Marya.

Pemerintah memang menurut Marya kini sudah punya pegangan terbaru melalui Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan. Stranas yang disahkan sebagai Perpres atau Peraturan Presiden yang mulai diberlakukan pada 15 September 2021.

Muatan Stranas Kelanjutusiaan menurut Marya cukup progresif karena memuat empat arah kebijakan. Di antaranya, meningkatkan perlindungan sosial bagi lansia; mengembangkan pendidikan keterampilan sepanjang hayat bagi lansia; dan mengembangkan program pemberdayaan lansia sesuai dengan kemampuan

dan minat; dan menyelenggarakan pemberdayaan kelanjutusiaan terintegrasi bagi mereka.

Akan tetapi, menurut Deshinta, Starans tidak bisa dijadikan acuan tentang progresivitas pemerintah dalam mengawal isu lansia. Jika kita mau merunut kembali strata perundang-undangan, kekuatan hukum Stranas berada di bawah undang-undang.

“Ini hanya petunjuk atau pedoman pada lembaga-lembaga pemerintahan untuk melaksanakan program kelanjutusiaan. Ini payung hukumnya kalau mau buat senam sehat misalnya maka merujuk pake stranas,” ucap Deshinta.

Ia melanjutkan, “Tetapi Stranas ini tidak sebanding dengan UU yang kekuatan hukumnya lebih tinggi. Jadi will-nya dalam mengawal isu ini saya lihat juga kurang. Lihat saja terkatung-katungnya proses revisi UU Kesejahteraan Lansia.”

Cepat Bergerak Hadapi Aging Society

Di tengah hiruk pikuk daerah Cibubur, Jakarta Timur terdapat rusun khusus lansia atau dikenal dengan Sasana Tresna Werdha (STW). Dikelola oleh Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan (YKBRP), STW itu pertama kali berdiri pada 14 Maret 1984.

Pembangunannya diinisiasi oleh Tien Soeharto untuk para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan para janda-janda pahlawan yang memang tidak memiliki tempat tinggal. Sri Kusumo Amdani, biasa dipanggil Dani, Ketua Badan Penyelenggara STW Ria Pembangunan mengatakan pada zaman Orde Baru, rusun khusus lansia ini digratiskan. Semua biaya disubsidi oleh pemerintah.

Namun, sejak 1988, ketika krisis moneter melanda Indonesia, STW Ria Pembangunan harus beroperasi sendiri dan mulai mengenakan biaya kepada setiap orang yang ingin tinggal di rusun itu. Kini setelah berjalan lebih dari 38 tahun, STW Ria Pembangunan menampung lansia dari berbagai daerah dan latar belakang.

“Nyatanya permasalahan dan upaya mewujudkan kesejahteraan lansia tidak pernah sederhana. Namun, kurang ‘seksinya’ topik lansia di kalangan pemangku kebijakan menjadi tantangan tersendiri. Wafatnya komnas lansia menjadi salah satu buktinya,” ungkap Marya.

“Semua lansia asalkan tidak memiliki penyakit menular, bukan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), dan memiliki demensia berat, boleh mendaftar tinggal di sini. Mereka juga harus tinggal dengan kemauan mereka sendiri bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh orang lain,” jelas Dani.

Per 2023, jumlah lansia yang tinggal sudah mencapai 50 orang. Ada yang tinggal sendiri, bersama saudara, maupun bersama istri atau suami mereka. Atiek Adiati, Bendahara STW Ria Pembangunan mengungkapkan biaya tinggal di rusun khusus lansia ini beragam tergantung dari fasilitas dan luas kamar. Kisaran harganya mulai dari Rp4 juta sampai yang tertinggi sebesar Rp8,8 juta sebulan.

“Dengan biaya itu, lansia mendapatkan makan tiga kali sehari, pemeriksaan kesehatan dengan dokter yang praktik di STW Ria Pembangunan, piknik, sampai kegiatan-kegiatan keterampilan seperti melukis, menyulam,” ungkap Dani.

Selain yang disebutkan Atiek, STW Ria Pembangunan juga menyediakan tempat olahraga khusus untuk lansia dengan pendamping dan *caregiver* dan perawat yang standby selama 24 jam. Alasannya, imbuah dia, lansia membutuhkan 3B, Berbicara, Bersosialisasi, dan Bergerak. Semua komponen yang bisa terpenuhi di rusun khusus lansia ini.

STW Ria Pembangunan memang jadi tempat ideal bagi lansia untuk menghabiskan waktu tuanya. Sayang, lagi-lagi tak semua lansia punya privilese yang sama secara finansial. Tidak ada data nasional terbaru yang tersedia tentang kesejahteraan lansia, namun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat pada 2021 ada sekitar 33.129 lansia terlantar.

Mereka adalah lansia yang mengalami kekerasan ekonomi. Terabaikan oleh anak-anaknya dan hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian dari mereka ada yang kemudian tinggal di Panti Werdha atau panti jompo yang dikelola pemerintah. Akan tetapi dalam keterangan Marya, Panti Wredha jumlahnya masih sedikit. Kapasitas dan fasilitasnya pun terbatas dibandingkan dengan jumlah lansia yang ada.

“Menurut analisis saya pas penelitian, memang isu ini (lansia) kurang seksi maka dari itu kurang perhatian. Demand untuk panti juga kurang karena di Indonesia masih pakai pendekatan keluarga bahwa lansia itu akan dirawat anaknya, ya walau kenyataannya banyak juga yang akhirnya ditelantarkan. Itu ngaruh ke pengelolaan panti. Mereka (pemerintah) enggak terdesak untuk memperbaiki fasilitas,” tutur Marya.

Murni menambahkan, berdasarkan penelitian SMERU, dana yang dimiliki Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) untuk pengelolaan panti juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan panti selalu mengarahkan lansia dikembalikan ke keluarga. Panti hanya menampung sementara karena keterbatasan dana.

Untuk menyelesaikan masalah ini, menurut Murni, pemerintah sudah seharusnya mulai membangun skema inovatif terkait perawatan jangka panjang untuk lansia. Salah satunya lewat panti jompo dengan fasilitas memadai dan mudah dijangkau. Pasalnya, panti jompo dengan pegawai terlatih, punya peranan yang sangat penting untuk menjamin kehidupan lansia karena tidak semua anggota keluarga bisa merawat mereka.

Terkait perawatan jangka panjang, selain panti Wredha, pemerintah memang punya Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak.

Program rehabilitasi berupa layanan langsung kepada lansia tersebut dilakukan oleh balai besar/balai/loka di lingkungan Kemensos yang dapat bermitra dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di daerah. Tetapi sayang seperti layaknya program dari pemerintah, program ATENSI punya kendala.

“Sebenarnya program ATENSI ini sangat bagus, hanya cakupan sangat kecil. Ketika kami melakukan wawancara pada 2021 sangat sulit mencari responden yang menerima bantuan. Sehingga cakupan penerima bantuan masih menjadi PR tersendiri,” ujar Murni.

Diwawancarai oleh Magdalene, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan, pemerintah melalui BKKBN juga punya program Bina Keluarga Lansia (BKL). Kegiatan pokok BKL meliputi penyuluhan, kunjungan rumah, dan pencatatan serta pelaporan. Ada juga program turunan seperti GoLantang (aplikasi untuk lansia) dan Sekolah Lansia (pemberdayaan lansia melalui pendidikan non-formal).

“BKL ini sangat penting karena kalau lansia tidak diberikan pengetahuannya tentang cara bertahan di masa tua mereka akan jadi beban ke generasi berikutnya. Kita ingin bonus demografi ini kan, tetapi kalau lansianya semua dependent akan berat juga. Akan ada sandwich generation yang terus-terusan lahir. Ini kan nanti larinya ke berkurangnya produktivitas generasi muda yang merawat lansia. Ngaruh ke ekonomi kita juga,” ungkap Hasto pada Magdalene.

Kendati BKKBN sudah memiliki program BKL yang cukup bagus untuk mempersiapkan lansia tangguh dan mandiri, bukan berarti program berjalan tanpa kendala. Secara umum kendala program BKL lain, sasaran target kegiatan BKL yang tidak tepat; partisipasi rendah baik lansia maupun keluarganya; minimnya ketersediaan kader lansia baik secara kuantitas maupun kualitas; jangkauan wilayah kegiatan BKL yang terlalu luas; dan anggaran yang terbatas. Ini dikutip langsung dari penelitian LIPI,

Penyelenggaraan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) di Wilayah Perkotaan: Potret Permasalahan Klasik (2020) yang ditulis oleh Deshinta bersama rekannya.

Deshinta pun menambahkan: “Idealnya satu desa itu ada penyuluh BKL, tapi dalam pelaksanaannya, mereka bekerja, gajinya enggak masuk, honor telat, ngobjek ke tempat lain banyak sekali permasalahan yang membuat sebuah program.”

Dengan kendala itu, menurut Deshinta RUU Kesejahteraan Lansia mendesak untuk disebut. Ini harus segera disahkan oleh pemerintah karena sebagai produk hukum tertinggi, undang-undang punya peran besar dalam memastikan kesejahteraan lansia lewat mekanisme yang lebih terintegrasi.

Kebijakan serta program berasal dari pemerintah pusat yang ditelurkan lewat undang-undang nantinya akan terintegrasi lewat pemerintah daerah. Pemerintah daerah paling pas mengkoordinasikan berbagai program lansia, karena paling memahami kondisi wilayah serta karakteristik masyarakatnya.

Deshinta menyadari, ada sejumlah kendala besar dalam pembentukan produk hukum baru. Dengan demikian, ada dua solusi lain yang bisa dilakukan dalam mengupayakan kesejahteraan lansia di masa sekarang dan masa depan.

Pertama, peningkatan literasi keuangan. Itu bukan hanya diberikan kepada lansia tetapi juga masyarakat usia produktif, terutama mereka dari kelas sosial bawah. Pemerintah bisa membuat program atau sosialisasi nasional terkait hal ini. Membiasakan masyarakat menabung untuk masa tuanya.

Ia pun mengatakan ini bisa dilakukan melalui kampanye pendidikan formal maupun informal. Dalam literasi keuangan ini pula, Deshinta menjelaskan dimuat sosialisasi terkait pentingnya jaminan sosial dan kesehatan. Tetapi dengan catatan, pemerintah juga sebelumnya juga harus melakukan skema persiapan jaminan pensiun atau jaminan hari tua, baik bagi pekerja

formal maupun informal. Jika sudah melakukan skema persiapan dan barulah semuanya diberikan sosialisasi sesuai dengan kelas sosial dengan tingkat ekonomi masing-masing.

Deshinta pun menambahkan: “Idealnya satu desa itu ada penyuluh BKL, tapi dalam pelaksanaannya, mereka bekerja, gajinya enggak masuk, honor telat, ngobjek ke tempat lain banyak sekali permasalahan yang membuat sebuah program.”

Kedua, penting untuk melakukan sinergi dengan berbagai universitas guna mengembangkan kapasitas dan aktualisasi lansia. Misalnya, dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa bisa digerakkan untuk peduli pada isu lansia. Ini sekaligus jadi cara efektif untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang tidak cukup dari pemerintah.

Selain kedua solusi ini, Murni juga menambahkan perlu adanya peningkatan penyediaan layanan kesehatan dan pendampingan yang memadai dan ramah lansia. Hal ini termasuk penjangkauan ke lansia, karena sebagian besar lansia akan sulit mengakses layanan kesehatan jika tidak didampingi. Bahkan berdasarkan responden yang SMERU wawancarai sebagian besar lansia merasa baik-baik saja, sehingga tidak merasa penting untuk memeriksakan kesehatan mereka.

“Sebenarnya pemerintah saat ini telah menyediakan layanan kesehatan ramah lansia. Seperti ketika di puskesmas antrian untuk lansia didahulukan kemudian adanya pelayanan door-to-door dari petugas kesehatan untuk lansia. Namun sayangnya, belum berjalan baik dan belum merata dilakukan, sehingga perlu adanya perbaikan dan pemerataan,” jelas Murni.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari:

<https://magdalene.co/story/kesejahteraan-lansia-yang-dipandang-sebelah-mata>

BACARITA KESPRO

Oleh **ITA IBNU**

Salah satu indikator dalam tujuan SDGs nomor 3 adalah menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Hal tersebut tampaknya masih menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia, BKKBN menyebutkan bahwa tiga risiko yang dihadapi oleh remaja, di antaranya seksualitas, HIV/AIDS, serta NAPZA. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi.

Kesehatan reproduksi merupakan sesuatu yang mutlak untuk diketahui oleh remaja masa kini, bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan sehingga kecenderungan pada hal – hal berbau pornografi dan pelecehan seksual dapat menurun. Dilansir dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) menjamin setiap warga negara Indonesia untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Artinya, setiap orang berhak menentukan pilihan terkait aktivitas seksualnya sendiri, serta mendapatkan akses terkait informasi dan pendidikan terkait seksualitas dan reproduksi.

Namun, pemenuhan HKSR sendiri masih sering berbenturan dengan nilai dan norma yang



hadir dalam masyarakat, utamanya yang terbentuk dan berakar dari kultur setempat. Di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang masih kuat menerapkan nilai tradisional, pembicaraan mengenai seksualitas dan reproduksi tak jarang dianggap tabu. Hal ini kemudian membangun tembok bagi masyarakat untuk membahas topik-topik tersebut, bahkan tentang masalah kekerasan seksual sekalipun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT mencatat sebanyak 276 kasus Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi terhadap perempuan sepanjang tahun 2022. Kasus perkawinan anak di bawah 19 tahun juga tercatat tinggi sejumlah 82.957. Hal ini diduga karena kurangnya edukasi kesehatan seksual dan reproduksi (Kespro) yang



menghasilkan gap pengetahuan serta disinformasi bagi orang tua dan anak-anak.

Situasi tersebut menimbulkan masalah di mana orang tua dan anak tidak memiliki bekal yang cukup untuk membuat keputusan yang aman dan layak terkait HKSR. Atas dasar pertimbangan inilah Mariana Yunita Hendriyani Opat – atau yang akrab disapa Kak Tata bersama dengan teman-temannya mendirikan Tenggara Youth Community di Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur. Tenggara Youth Community merupakan sebuah komunitas remaja dan anak muda yang fokus pada isu hak kesehatan seksual dan reproduksi anak dan remaja. Berdiri sejak tahun 2016, hadir karena adanya keresahan para pengurus akan pengalaman mereka menghadapi masa pubertas, serta ketakutan terhadap teman-

teman yang tidak mempunyai akses atau tidak bisa bangun kembali untuk mencapai mimpi-mimpi mereka karena mengalami kekerasan seksual dan gangguan kesehatan reproduksi. Kondisi tersebut juga didorong oleh belum adanya komunitas yang aktif pada isu kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi di Kota Kupang.

Isu kesehatan reproduksi sendiri adalah isu yang sangat penting, terutama pada remaja. Sebab, masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik menjaga kebersihan, yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), remaja adalah orang yang berusia 12 hingga 24 tahun. Masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa.

Artinya, proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai pada masa ini.

Reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Karena definisi yang terlalu umum tersebut, seringkali reproduksi hanya dianggap sebatas masalah seksual atau hubungan intim. Alhasil, banyak orang tua yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah tersebut pada remaja. Padahal, kesehatan reproduksi, terutama pada remaja merupakan kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Kurangnya edukasi terhadap hal yang berkaitan dengan reproduksi nyatanya bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Salah satu hal yang sering terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi adalah penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa remaja.

Tenggara Youth Community mengembangkan sebuah upaya inisiatif untuk membantu mengedukasi anak-anak dan remaja mengenai kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Salah satu programnya adalah Bacarita Kespro yang berasal dari kata bacarita dalam bahasa Melayu Kupang berarti 'bercerita'. Target program ini adalah remaja dari kelompok miskin, marginal, dikucilkan secara sosial dan *underserved*. Bacarita ini memberikan edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak remaja. Edukasi disampaikan dengan metode pembelajaran inovatif seperti mendongeng, permainan edukasi, dan penggunaan alat peraga.

Tata menggerakkan programnya untuk memberikan komunikasi dua arah, di mana peran orang tua, guru dan anak diikutsertakan. Ini berdasarkan banyaknya anak dikeluarkan dari sekolah saat menghadapi kasus kehamilan di luar pernikahan, serta minimnya pemahaman orang

tua mengenai hak dan kebutuhan remaja, begitupun pendidikan HKSR masih terbatas diajarkan di bangku sekolah.

Tata mengungkapkan bahwa para remaja penyintas kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering kali tidak memiliki wadah untuk bercerita. Bahkan, ketika kasus seperti kehamilan di luar nikah pada remaja terjadi, mereka justru dikeluarkan dari sekolah yang seharusnya memiliki peranan dalam melakukan edukasi dan perlindungan.

Menurutnya, kasus-kasus ini terjadi karena minimnya akses para remaja dan keluarganya terhadap informasi terkait Kespro. Dengan begitu, hadirnya Tenggara Youth Community akan memberikan ruang untuk membahas topik dengan tujuan mengedukasikan HKSR untuk para remaja.

Selain itu, Tata mengungkapkan bahwa keresahannya juga didasari oleh kekerasan yang menimpanya saat masih kecil dan saat menjalin hubungan. Teman-teman yang ikut menggerakkan komunitas ini juga memiliki keresahan dari pengalaman pribadi sebagai penyintas kekerasan seksual. Dengan demikian, Tata dan Tenggara Youth Community berupaya untuk menghapus serta mengartikan kembali maksud dan tujuan dari pendidikan seksual. Untuk mencapainya, perlu ada pendekatan terhadap keluarga, terutama orang tua, para remaja. Hal ini dicap penting karena keluarga merupakan ring nomor satu dalam partisipasi edukasi ke anak secara umum.

Bersama-sama, Tata berharap agar orang tua, pendidik dan masyarakat paham bahwa pendidikan Kespro harus dibahas dalam lingkungan keluarga. Dengan begitu, para remaja merasa aman untuk mendiskusikan topik terkait Kespro dan orang tua dapat berperan dalam mencegah dan melindungi anak-anaknya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Dengarkan Podcast BACARITA Kespro hanya di <http://bit.ly/basudara>



DISKUSI ONLINE LIVE

Instagram Story @infobakti



Daur Ulang untuk Kehidupan Berkelanjutan

" Mengubah sampah menjadi berkah", ini yang dilakukan oleh Rappo. Rappo adalah bisnis daur ulang yang mengubah plastik sekali pakai menjadi produk tas unik dan bernilai ekonomi.

Dengan sentuhan kreativitas, sampah plastik sekali pakai diolah menjadi produk berkualitas yang mendatangkan keuntungan finansial, sekaligus memberdayakan kelompok perempuan pesisir di Makassar sebagai mitra.



Posyandu Remaja Cegah Perkawinan Dini

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan menyebutkan hingga Maret 2022 terdapat 61 kasus perempuan hamil di bawah umur, sedikit menurun dari 81 kasus di tahun 2021. Prihatin dengan persoalan ini, Ningsi Selan, seorang remaja berusia 19 tahun di Desa Enonapi, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, menggerakkan Posyandu Remaja.

Ningsi Selan mengajak teman-teman sebayanya bergerak untuk berbagi pengetahuan kepada warga agar mencegah pernikahan di usia remaja. Kini, tak ada lagi kasus anak di bawah umur hamil di Desa Enonapi.

Selengkapnya kunjungi <https://www.instagram.com/infobakti/channel>

Podcast BASUARA



Di Balik Layar Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Nurul Amaliah, Petugas Pendamping Korban UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Sulawesi Selatan. Sehari-hari berhadapan dengan berbagai jenis korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT PPA Sulawesi Selatan. Nurul memiliki peran penting dalam kegiatan pendampingan maupun pemulihan korban: menerima keluhan atau masalah yang dialami korban, serta mendampingi korban dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dan pelayanan psikologis. Banyak cerita menyisahkan hati namun di balik itu banyak pula cerita mengharukan jika korban kembali bersemangat menjalani hidup setelah memperoleh pendampingan.



Apa Kata Mereka tentang Konsep Pendidikan di KTI

Menghadirkan dua anak muda yang sama-sama bergerak dalam isu pendidikan. Victor Matanggaran, Direktur Macanga Institute, peserta Program INSPIRASI 2021 serta Tirsana Kailola *Director of Child Program* - Pohon Sagoe dan Alumni Program INSPIRASI 2019. Kedua narasumber akan berbagi ide dan perspektif mereka tentang konsep pendidikan di Kawasan Timur Indonesia.

Podcast BASUARA (BaKTI Pu Suara) adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

Indonesia Penyumbang Sampah Makanan Terbanyak se ASEAN

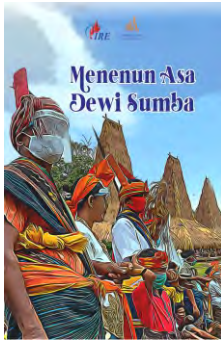
Menurut laporan dari United Nations Environment Programme (UNEP) bertajuk Food Waste Index 2021, Indonesia menjadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Total sampah makanan yang diproduksi Indonesia setiap tahunnya mencapai 20,93 juta ton.

Bahkan di tingkat dunia, Indonesia menduduki posisi urutan kedua sebagai negara paling rajin menumpuk sampah sisa makanan. Hal itu berdasarkan data laporan The Economist pada tahun 2011 bertajuk *Fixing Food: Toward the More Sustainable Food System*.

Pada tahun yang sama, setiap warga Indonesia rata-rata membuang sekitar 300 kilogram sampah makanan per tahunnya. Padahal, jika dibandingkan dengan data dari situs earth.org berjudul "15 Biggest Environmental Problems of 2023" yang ditulis oleh Deena Robinson, jumlah sampah tersebut jika dikelola dengan baik dapat mencukupi kebutuhan pangan lebih dari 3 milyar orang.

- <https://batukarinfo.com/komunitas/articles/indonesia-penyumbang-sampah-makanan-terbanyak-se-asean>

Publikasi Terbaru



Menenun Asa Dewi Sumba

Buku ini bisa menjadi bacaan yang "renyah" untuk dinikmati oleh semua kalangan yang tertarik untuk mengembangkan desa wisata dan wisata desa, meski kami pun tidak berharap semua desa harus menjadi desa wisata. Pariwisata adalah sumber penghidupan alternative yang dapat dikembangkan oleh desa, namun tidak harus menghilangkan basis penghidupan utama masyarakat desa.

Pandemi COVID-19 cukup menjadi pembelajaran bagi desa-desa yang selama ini justru memilih beralih menjadi desa wisata dan kehilangan basis ekonomi sektor primernya, pada akhirnya harus mengalami guncangan berat karena kebijakan pembatasan sosial yang membuat masyarakat yang hidup di sektor tersier harus kehilangan pekerjaan untuk kurun waktu yang cukup lama. Melalui buku ini, besar harapan kami agar maraknya pembangunan desa wisata saat ini mampu berkontribusi pada terciptanya pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di desa berbasis aset dan potensi lokal.

- <https://batukarinfo.com/referensi/menenun-asa-dewi-sumba>

Berita Terbaru

Optimalkan Potensi Kemaritiman Indonesia dalam Visi RPJPN 2025-2045

Untuk mendukung proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya menjangkau masukan dari para stakeholders, mitra pembangunan, dan perguruan tinggi. Fokus perencanaan jangka panjang kali ini adalah memaksimalkan potensi kemaritiman Indonesia untuk mencapai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Transformasi kultural dan struktural harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar menjadi negara maritim. Pertama, transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut sebagai halaman depan. Kedua, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari. Ketiga, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

- <https://batukarinfo.com/news/optimalkan-potensi-kemaritiman-indonesia-dalam-visi-rpjpn-2025-2045>